



# NEOLIBERALISME

Konsep dan Praktiknya di Indonesia

Coen Husain Pontoh  
& Arianto Sangadji

Kata Pengantar

**Muhammad Ridha**

# **Neoliberalisme**

## **Konsep dan Praktiknya di Indonesia**

Coen Husain Pontoh  
Arianto Sangadji

Kata Pengantar:  
Muhammad Ridha

*Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di Indonesia*

Coen Husain Pontoh

Arianto Sangadji

INDOPROGRESS

Judul : Neoliberalisme: Konsep dan Praktiknya di  
Indonesia  
Editor : Coen Husain Pontoh  
Penata Letak : Rinto Pangaribuan  
Perancang Sampul : Emma Wignjasoekarta  
Penerbit : Pustaka IndoPROGRESS, 2021

## Daftar Isi

2	Sekali Lagi tentang Neoliberalisme sebagai Konsep
24	Bab I: Kapitalisme-Neoliberal Sebagai Proyek Kelas: Sebuah Analisa Marxis
116	Bab II: Neoliberalisme Pengalaman Indonesia
183	Biodata Penulis

## **Sekali Lagi tentang Neoliberalisme sebagai Konsep**

*Muhammad Ridha*

SETELAH kapitalisme mengalami krisis finansial pada tahun 2008, banyak yang menganggap bahwa neoliberalisme sebagai suatu agenda politik sudah gagal. Aspirasi ini bukan hanya muncul dari kalangan yang memang sedari awal mengkritik agenda neoliberal itu sendiri. Badan Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF), lembaga keuangan global yang dikenal sebagai proponent utama neoliberalisme, tidak lupa untuk ikut-ikutan mengamini pentingnya mematikan neoliberalisme sebagai suatu

ortodoksi.

Melalui artikel yang diterbitkan di jurnal internal IMF yang berjudul, *Neoliberalism: Oversold*, tiga ekonom utama IMF Orstry, Loungani, dan Furceri<sup>1</sup> menyatakan bahwa dua elemen spesifik dari apa yang disebut agenda neoliberal: liberalisasi modal, atau seringkali dianggap sebagai penghilangan hambatan arus modal; dan konsolidasi fiskal, atau yang sekarang lebih sering disebut penghematan, telah gagal untuk memenuhi tujuan kebijakannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, namun hal tersebut diiringi dengan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan. Tidak heran jika kemudian mereka menganggap bahwa promosi kesuksesan neoliberalisme terkesan berlebihan. IMF seakan mengamini pandangan para radikal bahwa neoliberalisme memang lebih banyak menciptakan mudarat

---

<sup>1</sup> Ostry, J. D., Loungani, P., & Furceri, D, "Neoliberalism: oversold". *Finance & development*, 53(2), 2016: 38-41.

daripada manfaat.

Menariknya, deklarasi atas kegagalan neoliberalisme juga mulai merembet pada bagaimana neoliberalisme dikonseptualisasi. Sebagai suatu kerangka analisa, “neoliberalisme” dianggap gagal untuk memberikan garis konseptual yang jelas untuk memahami fenomena kapitalisme kontemporer. Dari kelompok ilmuwan sosial arus-utama seperti Boas dan Gans-Morse<sup>2</sup> misalnya, menganggap bahwa neoliberalisme sebagai konsep seringkali digunakan untuk menjelaskan secara eksesif banyak fenomena sosial sekarang. Melalui pemeriksaan terhadap 148 jurnal artikel yang diterbitkan dari tahun 1990 sampai 2004, Taylor C. Boas dan Jordan Gans-Morse berpendapat bahwa eksesifitas ini membuat konsep neoliberalisme seringkali dibiarkan tidak terdefiniskan secara jelas dalam penelitian empiris. Hal

---

<sup>2</sup> Boas, T. C., & Gans-Morse, J., “Neoliberalism: From new liberal philosophy to anti-liberal slogan”. *Studies in comparative international development*, 44(2), 2009: 137-161.

ini tentu bermasalah mengingat ketidakjelasan definisi membuat kita tidak memiliki petunjuk yang cukup mengenai apa itu neoliberalisme sebagai objek kajian.

Setali tiga uang dengan Boas dan Gans-Morse, akademisi Marxis seperti Bill Dunn<sup>3</sup> juga melihat bahwa neoliberalisme sebagai suatu konsep adalah konsep yang buruk. Lebih lanjut, Dunn berpendapat bahwa kekaburan konsep neoliberalisme tidak akan banyak membantu Gerakan Kiri. Karena kekaburan konseptual ini, penggunaan konsep neoliberalisme akan berdampak pada kekaburan orientasi strategis dari Gerakan Kiri itu sendiri dalam melawan kapitalisme. Alih-alih mengupayakan diri dalam perlawanan revolusioner untuk menumbangkan kapitalisme, kalangan Kiri dapat terjerembab dalam ilusi reformis tentang

---

<sup>3</sup> Dunn, B., “Against neoliberalism as a concept.” *Capital & Class*, 41(3), 2017: 435-454.

“perbaikan kapitalisme” yang bersifat non-neoliberal. Selain itu termin neoliberal juga sering dipakai oleh kelompok reaksioner kanan untuk melakukan insinuasikan terhadap lawan-lawan politiknya. Jika tidak berhati-hati, penggunaan konsep neoliberalisme sebagai konsep perlawanan dapat menjebak Gerakan Kiri untuk membuat “persekutuan kotor” (*unholy alliance*) yang tidak disadari dengan kalangan kanan reaksioner.

Walau terlihat ada keterhubungan antara menyatakan neoliberalisme sebagai agenda politik yang gagal dengan kegagalan konseptualisasi neoliberalisme, mengafirmasi keterhubungan antara keduanya menjadi sangat problematis. Harus diakui bahwa ada kebenaran dalam kritik neoliberalisme sebagai suatu konsep. Akan tetapi kritik ini tidak berarti dengan sendirinya mencukupi untuk menghentikan konseptualisasi atas neoliberalisme. Ada risiko politik yang membayangi ketika konseptualisasi atas neoliberal dihentikan. Karena hal tersebut sama saja

menghentikan upaya untuk memahami kompleks ekonomi politik yang berlaku objektif sampai dengan sekarang. Tanpa adanya upaya pemahaman atas kompleksitas ini, menjadi mustahil bagi kita untuk dapat keluar dari situasi sekarang.

### **Problem Konseptualisasi Neoliberalisme**

Kerumitan asali dalam upaya konseptualisasi neoliberalisme terletak pada kontradiksi neoliberalisme itu sendiri. Kajian tentang neoliberalisme selalu berangkat dari perkembangan historis kapitalisme yang terjadi *medio* 1970an, di mana model ekonomi kapitalis ala negara kesejahteraan (*welfare state*) mengalami krisis. Model kapitalisme negara kesejahteraan mendasarkan model ekonominya pada peran aktif negara di tingkatan domestik beserta sokongan institusi keuangan Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia) di tingkatan internasional. Neoliberalisme adalah respons kritis terhadap

situasi krisis dalam era ekonomi negara kesejahteraan. Dalam horison neoliberalisme, intervensi negara yang berlebihan adalah akar utama yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Solusi mendasar dari situasi krisis negara kesejahteraan adalah dengan meminimalisir peran negara dalam perekonomian dan menyerahkan proses ekonomi secara fundamental pada mekanisme pasar. Di sinilah kemudian neoliberalisme dipahami muncul sebagai suatu proyek ekonomi-politik yang mendasarkan dirinya pada keutamaan logika kompetisi pasar bebas yang dipercaya efisien.

Implisit dari proposisi neoliberalisme sebagai proyeksi imperatif logika pasar bebas adalah adanya asumsi dikotomis tentang relasi negara dengan pasar. Dalam asumsi ini, realisasi neoliberalisme hanya dapat mungkin jika kekuasaan negara bisa disingkirkan atau diminimalisir. Jikapun kekuasaan negara diakui, maka peranannya hanya sangat terbatas. Dalam

imajinasi proponen utama neoliberalisme seperti Milton Friedman<sup>4</sup>, peranan negara adalah sebatas wasit yang bertugas untuk memastikan aturan main (*rules of the game*) ditaati oleh seluruh peserta pasar agar kompetisi yang berlangsung antar mereka terjadi secara seimbang.

Kesulitan konseptualisasi kemudian muncul pada bagaimana neoliberalisme beroperasi sebagai suatu objek sosial yang hendak diobservasi. Sebagai kenyataan sejarah, neoliberalisme selalu mensyaratkan adanya peranan tertentu dari negara yang seringkali tidak dapat dinilai sebagai minimal. Hal ini mengingatkan neoliberalisme bukanlah suatu perkembangan alamiah dari dinamika ekonomi-politik yang ada. Untuk membuatnya operatif, neoliberalisme perlu dipaksakan implementasinya oleh peranan aktor non-pasar yang biasa termanifestasi

---

<sup>4</sup> Friedman, M., *Capitalism and Freedom: With the Assistance of Rose D. Friedman*, (Chicago: University of Chicago Press, 1962).

melalui pelaksanaan kekuatan represi negara.

Pada akhirnya, realisasi neoliberalisme menjadi lebih dari sekadar reinkarnasi sentimen *laissez-faire* tentang gagasan efisiensi inheren pasar. Dalam bentuk neoliberalisme ini, agendanya menjadi lebih luas untuk memperdalam nilai dan hubungan pasar menjadi model bagi organisasi politik dan masyarakat yang lebih luas. Untuk itu, kita menemukan kelit-kelindan antara negara dan pasar dalam proyek politik neoliberal. Gagasan seperti itu mengasumsikan bahwa “kegiatan ekonomi bergantung pada kerangka politik dan hukum yang sesuai, dan transformasi ekonomi, oleh karena itu, memerlukan modifikasi politik”. Chorev<sup>5</sup>, menunjukkan kemungkinan saling ketergantungan antara neoliberalisme dan negara ketika ada keinginan untuk mengimplementasikan agenda neoliberal .

---

<sup>5</sup> N. Chorev, “The institutional project of neo-liberal globalism: The case of the WTO”, *Theory and Society*, 34, 2005: 319.

Ketika kita mulai melihat kelit-kelindan antara negara dan pasar, maka sebagai suatu agenda neoliberalisme tidak bisa begitu saja memaksakan kerangka institusional pasarnya pada negara. Ia juga harus menyesuaikan dengan kekhasan lembaga negara untuk memastikan operasi logika pasar yang optimal. Segala bentuk pemaksaan tanpa persetujuan institusional hanya akan membuat neoliberalisme rentan terhadap perlawanan dan destabilisasi. Dengan kondisi ini, neoliberalisme menjadi objek dari kontekstualisasi negara yang mana realisasi atas proyeksi politiknya menjadi relatif terhadap politik negara yang ada.

Ilustrasi yang bagus untuk memaparkan dilema konseptualisasi neoliberalisme sebagai contoh dapat dilihat pada teori reorganisasi oligarki di Indonesia yang dikembangkan oleh Robison-Hadiz<sup>6</sup>. Teori ini pada dasarnya adalah kritik

---

<sup>6</sup> Robison, R., & Hadiz, V. R., *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. (London: Routledge, 2004).



terhadap pandangan yang menganggap bahwa neoliberalisme sebagai agenda reformasi pasar tengah berlaku di Indonesia pasca jatuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998. Bagi mereka, promosi institusi-institusi reformasi pasar ala neoliberal yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, secara sistematis berhasil dibajak oleh kekuasaan oligarki yang diasuh oleh otoritarianisme negara era Orde Baru. Pembajakan ini membuat implementasi agenda neoliberal melalui institusi reformasi pasar menjadi subordinat atas kepentingan kelompok oligarki yang menguasai institusi tersebut. Berdasarkan amatan Robison-Hadiz ini, kita bisa menyimpulkan bahwa agenda pasar yang kompetitif ala neoliberal tidak ada dalam pengalaman Indonesia pasca-Orde Baru.

Pada titik inilah argumen mendasar tentang neoliberalisme sebagai suatu konsep menjadi bermasalah. Jika memang neoliberalisme sebagai praktik akan selalu dimediasi oleh kekuatan

non-pasar, lalu apa yang “neoliberal” dari neoliberalisme jika pasar tidak pernah muncul secara murni?

### **Solusi Marxis**

Walau terdapat problem fundamental dalam konseptualisasi neoliberalisme, bukan berarti tidak ada upaya untuk menawarkan solusi. Salah satu solusi metodologis yang dapat diajukan, menurut saya, adalah tidak dengan melihat hubungan pasar dengan non-pasar (atau negara) sebagai anomali dalam konseptualisasi neoliberalisme. Di sini perspektif Marxisme tentang dialektika dapat sangat membantu. Hubungan antara pasar dengan non-pasar dapat dipahami sebagai hubungan yang saling memengaruhi (*interpenetrate*) yang dengannya membentuk neoliberalisme sebagai suatu totalitas fenomena sosial. Keberadaan relasi non-pasar dalam agenda pasar neoliberalisme harus diakui sebagai kondisi kontradiksi yang inheren bagi

neoliberalisme itu sendiri.

Ada dua implikasi yang patut dicatat dari posisi metodologis ini terhadap konseptualisasi neoliberalisme. *Pertama*, neoliberalisme tidak lagi dapat dipahami sebagai suatu perihal namun sebagai suatu proses. Neoliberalisme bukanlah “apa” namun “bagaimana”. Dalam hal ini neoliberalisme harus dipahami sebagai sesuatu yang selalu menjadi secara dinamis. Dinamis dalam arti interaksi dengan kekuatan non-pasar selalu terjadi dalam proses produksi serta reproduksi relasi pasar sebagaimana yang dikehendaki dalam proyeksi neoliberalisme itu sendiri.

Implikasi yang kedua adalah konseptualisasi atas neoliberalisme pada dasarnya adalah konseptualisasi atas variasi neoliberalisme. Tidak ada yang namanya bentuk neoliberalisme murni. Realisasi atas neoliberalisme pada dasarnya adalah interaksi proyeksi pasar ala neoliberal dengan kekuatan-kekuatan non-pasar yang

terkontekstualisasi dalam ruang dan waktu tertentu. Hal inilah yang kemudian membuat neoliberalisme sebagai konsep menjadi sangat elusif, bahkan relatif, karena penjelasan atas dirinya tidak dapat bersifat umum. Satu-satunya keumuman adalah keumuman tentang imperatif pasar bebas yang pada dasarnya bersifat abstrak.

Walau Marxisme menawarkan solusi metodologis atas problem konseptualisasi dari neoliberalisme, bukan berarti posisi metodologis ini bebas dari masalah. Salah satu masalah akut yang dapat muncul dari metode Marxisme adalah bias teleologi yang dapat menjebak penjelasan neoliberalisme menjadi suatu proses determinisme pasar bebas. Alih-alih mengupayakan penjelasan yang konkret tentang neoliberalisme sebagai interaksi antara keharusan pasar bebas dengan kekuatan non-pasar, metode Marxis justru mendorong pemahaman bahwa keberadaan entitas non-pasar yang berlaku dalam proses neoliberalisme menjadi sebatas fungsi dari

mekanisme produksi dan reproduksi relasi pasar bebas. Dengan kata lain, entitas non-pasar sudah selalu tereduksi dalam penjelasan imperatif pasar bebas itu sendiri.

Untuk keluar dari jebakan teleologis ini, kesadaran reflektif peneliti menjadi penting. Walau hubungan antara keharusan pasar bebas dengan kekuatan non-pasar adalah inheren, bukan berarti entitas antar-keduanya bersifat internal. Mempertahankan proposisi bahwa pasar dan non-pasar adalah dua entitas yang berbeda adalah penting. Entitas-entitas ini tidak dapat direduksi antara satu dengan yang lain. Kelitkelindan antar-entitas bukan merupakan hasil “relasi internal” namun manifestasi dari proses historis kapitalisme yang kontingen setelah krisis tahun 1970an

Ada dua keuntungan yang dapat diambil dari asumsi ini. Yang *pertama* adalah dimungkinkannya klarifikasi konseptual. Neoliberalisme secara minimal dapat

didefinisikan sebagai entitas pasar bebas beserta seluruh proses yang mendukung produksi dan reproduksinya. Di luar entitas pasar bebas, kita dapat mengasumsikan itu bukanlah manifestasi neoliberal. Sementara yang *kedua* adalah, dimungkinkannya pengujian konsep neoliberalisme sebagai suatu hipotesis. Kesalinghubungan antara entitas pasar bebas dengan non-pasar tidak dengan sendirinya mengasumsikan imperatif pasar bebas. Suatu proses hanya dapat dikatakan neoliberal jika interaksi imperatif pasar dengan non pasar yang menciptakan dominasi pasar dapat dibuktikan dan diverifikasi secara empirik. Fenomena non-neoliberal adalah proses yang tidak berhubungan langsung dengan relasi produktif dan reproduktif pasar bebas.

Pengalaman reformasi ekonomi di Cina dapat dijadikan contoh keuntungan metode dialektika non-teleologis seperti ini. Dalam studi neoliberalisme, Cina era reformasi ekonomi

sering sekali dijadikan studi kasus tentang bagaimana neoliberalisme beroperasi pada ruang waktu tertentu. Liberalisasi struktur ekonomi Cina yang dilakukan oleh negara menciptakan kondisi yang diperlukan untuk merealisasikan imperatif pasar bebas<sup>7</sup>. Masalahnya kemudian, liberalisasi ekonomi yang dilakukan negara Cina tidak serta-merta memperkuat posisi sektor privat Cina, malahan sektor publik Cina tetap merupakan sektor yang utama dalam perekonomian Cina. Belum lagi kenyataan bahwa semenjak liberalisasi, kekuasaan Partai Komunis Cina tidak berkurang pengaruhnya sedikit pun dalam menguasai negara.<sup>8</sup>

Dengan cara pandang non-teleologis, kita dapat tercegah dari jebakan reduksionisme

---

<sup>7</sup> Lihat Harvey, David., *The New Imperialism*, (Oxford: Oxford University Press, 2003); dan Harvey, David., *A Brief History of Neoliberalism*, (Oxford: Oxford University Press, 2005).

<sup>8</sup> Nonini, D. M., "Is China becoming neoliberal?," *Critique of Anthropology*, 28(2), 2008: 145-176.

tentang perkembangan ekonomi Cina. Walau secara kasat mata kita melihat bahwa imperatif pasar ala neoliberal memang bekerja di Cina, namun kita tidak harus mengasumsikan bahwa proses tersebut dengan sendirinya menciptakan neoliberalisme. Dengan kata lain, cara pandang dialektika non-teleologis membantu kita untuk tidak melakukan penilaian yang terburu-buru terhadap fenomena sosial yang kita anggap sebagai neoliberal.

### **Kontribusi Buku Ini**

Dalam kepentingan penjelasan neoliberalisme itu, buku saku yang terkesan ringkas dan kecil yang disusun oleh Coen Husain Pontoh dan Arianto Sangadji ini, tampak usaha untuk menjelaskan neoliberalisme secara dialektis. Sebagai Marxis yang baik, mereka sama-sama bersepakat bahwa untuk menjelaskan neoliberalisme kita perlu melihat relasi serta interaksi yang dinamis dalam proses neoliberalisme itu sendiri.

Relasi yang melibatkan banyak faktor yang seringkali tidak terkait dengan imperatif pasar ala neoliberalisme itu sendiri.

Banyak kalangan, termasuk kalangan kapitalis sendiri, yang melihat neoliberalisme sudah gagal dan menghendaki untuk dihentikannya proyek ini. Namun, sayangnya, di tengah harapan banyak orang ini, keberadaan neoliberalisme dengan seluruh perangkatnya tidak ke mana-mana. Di sini kita melihat bagaimana harapan untuk menghentikan neoliberalisme tidak dapat dilakukan pada sebatas menyatakan bahwa ia adalah proyek gagal. Neoliberalisme dapat dihentikan relevansinya jika kita memiliki imajinasi tentang sistem ekonomi lain selain neoliberalisme. Imajinasi ini hanya dapat muncul jika kita memiliki pemahaman yang mumpuni tentang neoliberalisme itu sendiri. Hal ini justru mensyaratkan pentingnya mempertahankan relevansi neoliberalisme sebagai suatu konsep. Hanya dengan kembali melakukan

konseptualisasi atas neoliberalisme kita memiliki gambaran untuk menentanginya sekaligus untuk mengubahnya. Dalam kebutuhan inilah buku saku ini menjadi sangat relevan untuk dibaca.\*\*\*

**Muhammad Ridha** adalah anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP), kini tengah melanjutkan studi doktoral di Amerika Serikat.

### Daftar Pustaka

- Boas, T. C., & Gans-Morse, J. (2009). "Neoliberalism: From new liberal philosophy to anti-liberal slogan". *Studies in comparative international development*, 44(2), 137-161.
- Chorev, Nitsan., (2005), , "The institutional project of neo-liberal globalism: The case of the WTO", *Theory and Society*, 34, 2005:

317-355.

Dunn, B. (2017). "Against neoliberalism as a concept." *Capital & Class*, 41(3), 435-454.

Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom: With the assistance of Rose D. Friedman*. University of Chicago Press.

Harvey, David (2003). *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.

Nonini, D. M. (2008). "Is China becoming neoliberal?". *Critique of Anthropology*, 28(2), 145-176.

Ostry, J. D., Loungani, P., & Furceri, D. (2016). "Neoliberalism: oversold". *Finance & development*, 53(2), 38-41.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004).

*Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.

## **Bab I: Kapitalisme-Neoliberal Sebagai Proyek Kelas: Sebuah Analisa Marxis**

*Coen Husain Pontoh*

### **Pendahuluan**

SAAT ini penggunaan istilah neoliberalisme sudah menjadi hal lumrah dipakai dan didengar dalam perbincangan para aktivis, pejabat publik, dan intelektual di Indonesia. Ketika kasus *bailout* Bank Century mengemuka beberapa tahun lalu, misalnya, diskursusnya tidak lagi sekadar berpusar pada perilaku buruk pejabat publik yang menyalahgunakan

kekuasaannya, tapi sebagai konsekuensi dari diadutnya kebijakan neoliberal oleh penyelenggara negara dan otoritas keuangan nasional.<sup>1</sup> Demikian juga ketika pemerintah menaikkan

---

<sup>1</sup> Pandangan ini, misalnya, dikemukakan oleh Ferry Juliantoro, ketua Dewan Tani Indonesia (DTI). Pada Maret 2010, DTI adalah salah satu organisasi yang bergabung dalam koalisi Gerakan Indonesia Bersih (GIB) yang terdiri dari elemen seperti Serikat Rakyat Miksin Indonesia (SRMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), SPSI, Liga Mahasiswa Demokrasi (LMD), HMI, GMNI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB). Dengan massa yang jumlahnya mencapai ribuan, GIB ini mengadakan demonstrasi di depan gedung DPR-RI, yang menuntut penyelesaian kasus bailout Bank Century, menolak kebijakan neoliberalisme dan menolak pemberlakuan perdagangan bebas kawasan ASEAN dan China (ACFTA). Lihat “DTI: Rapat DPR Diharapkan Hasilkan Keputusan Yang Jelas,” AntaraNews, 2/3/2010, <http://www.antaranews.com/berita/176024/dti-rapat-dpr-diharapkan-hasilkan-keputusan-yang-jelas>, diunduh pada 10/22/2013. Yang menarik, dari kalangan pengusaha pun wacana neoliberalisme di masa pemerintahan SBY-Budiono ini turut diperbincangkan secara kritis. Lihat John A. Prasetyo, “The crisis of neoliberalism: Rhetoric and reality,” *The Jakarta Post*, June 18, 2009, <http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/18/the-crisis-neoliberalism-rhetoric-and-reality.html>. Diunduh pada 10/22/2013.

harga bahan bakar minyak (BBM), biaya pendidikan dan kesehatan yang tak terjangkau rakyat miskin, hingga terjadinya kelangkaan pasokan daging dan bawang merah di pasaran, serta kian terpuruknya kehidupan petani, nelayan, dan buruh, hal itu dianggap sebagai akibat penerapan kebijakan neoliberal dari pemerintahan pasca-reformasi 1998.<sup>2</sup>

Dengan semakin meluasnya penggunaan kosakata neoliberalisme sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, maka diskusi tentang arah pembangunan nasional menjadi lebih bermutu. Artinya, diskusi tentang bagaimana seharusnya arah pembangunan nasional tidak lagi didominasi oleh perbincangan tentang siapa aktor

---

<sup>2</sup> Ahmad Heri Firdaus, "Krisis Kedelai Di Negeri Subur," *Analysis*: N0. 29 TAHUN II, 19-25 September 2013, <http://m.sindoweekly-magz.com/artikel/29/ii/19-25-september-2013/analysis/174/krisis-kedelai-di-negeri-subur>; lihat juga "BHMN, Neoliberalisme Pendidikan," *Universitas Katolik Indonesia Atmajaya*, <http://www2.atamajaya.ac.id/ml/content.asp?f=0&id=3522>. Diunduh pada 10/22/2013.

(individu maupun partai politik) yang berkuasa, namun juga mempertanyakan apa ideologi yang dianut oleh aktor tersebut. Namun, hingga sejauh ini, pemahaman terhadap kosakata neoliberalisme masih menjadi perdebatan, baik dalam lingkungan akademis maupun politik. Sebagian kalangan menganggap bahwa istilah ini lebih bernuansa politik-ideologis ketimbang aspek akademis dan analitiknya,<sup>3</sup> sementara sebagian lainnya menggunakan neoliberalisme sebagai kritik atas segala sesuatu yang datang dari luar, khususnya dominasi asing terhadap perekonomian nasional, dan sekaligus sebagai rasionalisasi atas pentingnya nasionalisme.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> "Chatib Basri: Kwik Tak Bisa Bedakan Neoliberal dan Neozepe," *Detikfinance*, 26/05/2009, <http://finance.detik.com/read/2009/05/26/111801/1137212/4/chatib-basri-kiwik-tak-bisa-bedakan-neoliberal-dan-neozepe>; lihat juga "Rizal: Kwik Sakit Kepala," *Kompas*, 29/5/2009, <http://female.kompas.com/read/2009/05/26/20005370/rizal.kwik.sakit.kepala>. Diunduh pada 10/22/2013.

<sup>4</sup> "Amin Rais Ragukan Nasionalisme Jokowi," *Tempo.co*, 12/9/2013, <http://www.tempo.co/read/>



Tulisan ini berargumen bahwa neoliberalisme harus dipahami sebagai sebuah sistem yang muncul dari dalam logika dan dinamika internal kapitalisme. Dengan demikian, neoliberalisme adalah produk sekaligus bagian integral dari kapitalisme, sehingga pemahaman atasnya mensyaratkan pemahaman atas kapitalisme terlebih dahulu. Dalam bingkai argumen seperti ini, maka saya menolak argumen nasionalisme sempit yang sekadar anti asing atau anti Barat, lebih khusus lagi anti Amerika Serikat seperti yang selama ini dikemukakan oleh para kritikus neoliberalisme. Di samping itu, dengan melihat neoliberalisme sebagai produk dari logika dan dinamika internal kapitalisme, maka kita bisa menentukan kelas mana yang paling

---

news/2013/09/12/078512636/Amien-Rais-Ragukan-Nasionalisme-Jokowi; lihat juga "Ahmad Syafii Maarif: Dibutuhkan Pemimpin Baru Yang Bernyali," *SindoWeekly*, 23-29 Mei 2013, <http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/12/i/24-30-mei-2012/qanda/10/dibutuhkan-pemimpin-baru-yang-bernyali>. Diunduh pada 10/22/2013.

dirugikan serta aliansi kelas seperti apa yang paling mungkin dibangun dalam perlawanan terhadap neoliberalisme.

Dengan demikian, tulisan ini sekaligus merupakan kritik atas kritik yang dominan dan populer selama ini, yang mengatakan bahwa neoliberalisme merupakan koreksi atas kegagalan pasar terkendali di bawah rezim Keynesianisme dan Sosial-demokrasi di Amerika Utara dan Eropa Barat, serta model industrialisasi berorientasi impor (juga terkenal dengan istilah negara pembangunan/*developmental state*)<sup>5</sup> yang dianut negara-negara yang baru merdeka

---

<sup>5</sup> Radice menulis bahwa kunci dari instrumen negara pembangunan/*developmental state* "are designed around the principle that existing price relativities and other market signals should be deliberately distorted, through selective tariffs, subsidies and access to finance, in order to induce a step-change in the pace and direction of capital accumulation." Lihat Hugo Radice, "The Developmental State under Global Neoliberalism," *Third World Quarterly*, Vol. 29, No. 6, (2008): 1153 – 1174.

di Selatan.<sup>6</sup> Narasi utama dari kritik dominan mengatakan bahwa neoliberalisme bertolak dari ajaran filosofis yang menekankan kebebasan individu, kebebasan memilih, masyarakat pasar, *laissez-faire*, dan pemerintahan yang minimal.<sup>7</sup> Dalam kalimat Robinson, neoliberalisme adalah sebuah ideologi yang melegitimasi gaya hidup individualis, setiap orang bagi dirinya sendiri,

---

<sup>6</sup> Dalam kepustakaan berbahasa Indonesia, salah satu buku yang cukup komprehensif membahas soal neoliberalisme dari perspektif ini adalah karya Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, (Publishing Company, 2008); lihat juga Rika, *Change or Continuity? Rethinking Neoliberal Trajectory Amidst Regime Change in Indonesia*, in partial fulfillment of the requirements for obtaining the degree of MASTERS OF ARTS IN DEVELOPMENT STUDIES, (The Hague, The Netherlands, November 2010).

<sup>7</sup> Henk Overbeek and Kees van der Pijl, "Restructuring capital and restructuring hegemony neo-liberalism and the unmaking of the post-war order" in Henk Overbeek (edited), *Restructuring Hegemony In The Global Political Economy the rise of transnational neo-liberalism in the 1980s*, (London: Routledge, 1993), 15.

sebuah ideologi hukum rimba."<sup>8</sup> Lalu dari mana alat-alat untuk bisa bertahan hidup itu diperoleh? Jawabannya tak lain pada pasar, karena itu dalam bidang ekonomi neoliberalisme dimaknai sebagai sebuah sistem di mana keseluruhan aktivitas ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Menurut keyakinan ini, negara yang baik adalah yang tidak turut campur dalam mekanisme pasar kecuali dalam rangka memfasilitasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut. Untuk itu perlu dibuat serangkaian kebijakan seperti deregulasi, liberalisasi perdagangan dan investasi, privatisasi, pemotongan anggaran publik, serta hubungan kerja yang fleksibel.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> William I. Robinson, *Latin America and Global Capitalism A Critical Globalization Perspective*, (Baltimore: John Hopkins University Press, 2008), 17.

<sup>9</sup> Sebuah penjabaran paling baik tentang rangkaian kebijakan neoliberal itu dikenal dengan sebutan Konsensus Washington (*Washington Consensus*), yang meliputi sepuluh butir kebijakan: (1) disiplin fiskal; (2) pencabutan anggaran belanja publik; (3) reformasi perpajakan, yakni perluasan basis pajak dan pemotongan tingkat pajak marjinal; (4)

Dalam pengertian ini, neoliberalisme dianggap sebagai suatu aliran pemikiran yang memiliki akar pada gagasan kapitalisme awal, khususnya pada pemikiran Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*.<sup>10</sup> Namun demikian, walaupun gagasan ini bisa dilacak ke Adam Smith, tetapi neoliberalisme bukanlah sebuah kebangkitan baru dari praktik-praktik kapitalisme abad ke-19 tersebut. Dalam bahasa Howard dan King, neoliberalisme bukanlah sebuah kelahiran kembali (*rebirth*) liberalisme klasik, melainkan sebagai koreksi dari “ekonomi campuran/*mixed*

---

liberalisasi finansial; (5) pengaturan nilai tukar guna memicu pertumbuhan ekspor non-tradisional; (6) liberalisasi perdagangan; (7) penghapusan halangan investasi asing langsung; (8) deregulasi; (9) perlindungan hak kekayaan intelektual; serta (10) minimalisasi peran negara dalam pasar.

<sup>10</sup> Argumen ini juga yang digunakan oleh Rizky dan Majidi dalam buku mereka. Menurut keduanya, “Neoliberalisme sebagai sebuah gagasan sudah dikenal sejak 1930an. Sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ekonomi kapitalisme, konsep ini adalah kelanjutan dari konsep liberalisme.” Lihat Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, 230-31.

*economy*” yang muncul 30 tahun setelah Perang Dunia II.<sup>11</sup> Hackworth mengatakan, lebih dari sekadar koreksi dari ekonomi campuran, neoliberalisme adalah sebuah ideologi yang menolak liberalisme egalitarian secara umum dan negara kesejahteraan Keynesian secara khusus, dengan mengombinasikan seperangkat gagasan liberalisme klasik secara selektif, khususnya yang dikemukakan oleh Hayek.<sup>12</sup>

Sementara kalangan Marxis berpendapat, kita tidak akan bisa memahami neoliberalisme jika bertolak dari kegagalan hubungan pasar dan negara yang dinisbatkan pada rezim-rezim sebelumnya. Hubungan pasar dan negara hanyalah ekspresi atau penampakan dari hubungan yang lebih esensial antara

---

<sup>11</sup> M. C. Howard and J.E. King, *The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies A Materialist Analysis*, (New York: Palgrave Macmillan, 2008), 2.

<sup>12</sup> Jason Hackworth, *The Neoliberal City Governance, Ideology, and Development in American Urbanism*, (New York: Cornell University Press, 2007), 9.

buruh-kapital dalam proses kerja (*labor process*) kapitalisme. Menurut kaum Marxis, neoliberalisme harus dilihat sebagai koreksi internal atas kapitalisme yang sedang mengalami krisis di Eropa dan Amerika Serikat pada akhir dekade 1960-an dan pertengahan 1970-an. Sebagai sebuah koreksi, ini berarti neoliberalisme adalah fase tertentu, atau lebih tepatnya, fase terbaru dari perkembangan kapitalisme.<sup>13</sup> Sebagaimana dikatakan Saad-Filho dan Johnston, neoliberalisme adalah sebuah organisasi kapitalisme tertentu, yang dalam perkembangannya bertujuan untuk melindungi kapital(isme) dan meminimalisir kekuatan kelas buruh.<sup>14</sup> Karena itu tulisan ini tidak akan membahas neoliberalisme dalam pengertian kebijakan ekonominya,

---

<sup>13</sup> Gérard Duménil and Dominique Lévy, *The Crisis of Neoliberalism*, (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 1.

<sup>14</sup> Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston, "Introduction." In Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston (edited), *Neoliberalism A Critical Reader*, (London: Pluto Press, 2005), 3.

dampak ekonomi-politik yang ditimbulkannya, serta respons kalangan anti-neoliberal selama ini. Mengikuti argumen Marxis di atas, tulisan ini bermaksud membahas: *pertama*, bagaimana definisi Marxis tentang kapitalisme; dan *kedua*, memotret momen krisis dalam kapitalisme dan bagaimana konfigurasi kekuatan kelas dalam masyarakat kapitalis maju yang berujung pada kemunculan neoliberalisme sebagai respons terhadap krisis tersebut.

### **Kapitalisme Sebagai Hubungan Sosial Produksi**

Setelah runtuhnya tembok Berlin dan ideologi neoliberalisme mendominasi, kosakata kapitalisme menghilang dari perbincangan akademik maupun publik. Sebagai gantinya, kosakata pasar merebak luas penggunaannya, baik dalam pengertian yang ideologis, politik, maupun ekonomi. Secara ideologis, pasar telah menjadi arena di mana segala harapan dan daya imajinasi mengenai kemakmuran diletakkan. Sehingga

itu, seluruh orientasi bermasyarakat harus ditujukan untuk memfasilitasi dan menjamin agar pasar bekerja tanpa hambatan. Secara ekonomi, pasar adalah sebuah arena tempat berlangsungnya transaksi dari yang paling sederhana seperti sistem barter hingga yang paling rumit seperti pasar keuangan; dari transaksi yang berlangsung secara kasatmata hingga transaksi virtual.

Secara politik, pasar dianggap sebagai satu-satunya model ekonomi yang kompatibel dengan demokrasi. Proses tawar-menawar yang tanpa paksaan antara pembeli dan penjual di pasar, diidealisasikan sebagai mirip dengan bagaimana demokrasi bekerja di ranah politik. Karena itu, semakin mekanisme pasar bekerja tanpa terinsterupsi, maka semakin mungkin lah demokrasi terkonsolidasi. Atau dalam bahasa Andrés Pérez Baltodano, demokrasi adalah konsensus sosial yang melingkupi seluruh hubungan yang harus eksis di antara pasar, negara, dan masyarakat yang tengah dalam proses

perkembangan.<sup>15</sup>

Begitu hegemoniknya penggunaan kosakata pasar ini, kapitalisme lalu diasosiasikan dengan pengertian tersebut dalam makna yang netral. Tetapi kalau kita merujuk pada Karl Marx, maka pengasosiasian kapitalisme dengan pasar adalah keliru. Sehingga sebelum kita lanjut, perlu diberikan klarifikasi singkat tentang pengertian kapitalisme dan kemudian bagaimana sistem ini bekerja menurut Marx, yang membuatnya berbeda secara esensial dengan pengertian pasar.

Kalau kita perhatikan karya-karya Marx, ia tidak pernah menggunakan istilah kapitalisme untuk menyebut sebuah sistem ekonomi tertentu. Yang kita temukan adalah kosakata kapital (*capital*) dan kapitalis (*capitalist*) atau masyarakat borjuis (*bourgeois society*). Menurut

---

<sup>15</sup> Lihat Coen Husain Pontoh, "Jalan Amerika Latin Tambahan Untuk Budiman Sudjatmiko," *IndoPROGRESS*, 25 Desember 2006, <http://indoprogress.com/jalan-amerika-latin/>. Diunduh pada 12 November 2013.

Shapiro, Marx menggunakan istilah kapital dan bukan kapitalisme, karena pada masanya *style "ism-ing"* kurang populer dipakai oleh gerakan sosial atau kultural saat itu.<sup>16</sup> Dalam tulisan ini, istilah kapitalisme digunakan dengan merujuk pada istilah kapital yang dimaksud Marx.

Namun demikian, Marx sendiri menggunakan istilah kapital dalam beragam pengertian. Pada satu ketika, ia memakai istilah kapital dengan merujuk pada benda (*thing*), sementara pada waktu yang lain kapital digunakannya untuk merujuk pada uang (*money*). Dalam *Wage Labour and Capital*, ia mendefinisikan "kapital terdiri atas bahan baku, alat-alat kerja dan seluruh bentuk alat-alat subsisten, yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan baku baru, instrumen-instrumen kerja dan alat-alat subsisten

---

<sup>16</sup> Stephen Shapiro, *How to Read Marx's Capital*, (London:Pluto Press, 2008), ix.

baru."<sup>17</sup> Tetapi, di tempat lain ia mengatakan, "kapital bukanlah sebuah benda, tapi sebetulnya hubungan sosial produksi yang berkaitan dengan formasi sosial sejarah tertentu, yang secara sederhana mengambil bentuk benda dan menasbihkan kepada benda tersebut sebuah karakter sosial yang khusus."<sup>18</sup> Artinya, kapital secara kasatmata tampak dalam wujud benda-benda, misalnya alat-alat produksi dan uang, tetapi esensi dari kapital adalah sebuah hubungan sosial produksi. Karena itu, misalnya, berkaitan dengan uang, dalam *Grundrisse* Marx mengatakan, "... uang adalah sebuah hubungan sosial, hubungan yang pasti antara individu..."<sup>19</sup>

Dari definisi Marx ini, maka kapitalisme

---

<sup>17</sup> Lihat Robert C. Tucker (ed), *The Marx Engels Reader*, (New York: W.W. Norton, 1978), 207.

<sup>18</sup> Karl Marx, *Capital: Volume III*, (New York: Penguin Books, 1981), 953.

<sup>19</sup> Karl Marx, *Grundrisse*, (New York: Penguin Books, 1993), 237.

berarti sebuah hubungan sosial produksi yang eksis dalam sebuah periode tertentu perkembangan sejarah masyarakat. Dengan kata lain, esensi kapitalisme pertama-tama dan terutama adalah hubungan antar manusia, bukan hubungan antara manusia dengan benda, apalagi hubungan di antara benda-benda. Karena merupakan hubungan sosial produksi, maka hubungan antara manusia yang dimaksud adalah hubungan antara pemilik alat-alat produksi yang tujuan utamanya adalah meraih keuntungan tanpa batas, dengan mereka yang tidak memiliki alat-alat produksi, yang untuk hidup mereka harus menjual tenaganya kepada pemilik alat-alat produksi. Dalam *Manifesto Komunis*, Marx dan Engels menyebut pemilik alat-alat produksi sebagai kelas borjuasi dan yang tidak memiliki alat-alat produksi sebagai kelas proletariat.

Hubungan kelas ini dimulai dari proses di mana borjuasi datang ke pasar untuk membeli tenaga kerja buruh pada harga tertentu. Di sisi

lain, sejak buruh terlepas dari alat-alat produksinya maka untuk bisa hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, mereka pergi ke pasar kerja untuk menjual tenaganya kepada borjuasi. Proses ini berakhir ketika terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dengan memiliki tenaga kerja buruh, maka borjuasi secara hukum berhak menggunakan, mengatur, mengontrol, dan mengeksploitasi tenaga kerja tersebut untuk menghasilkan komoditi yang akan dipertukarkan di pasar. Marx mengabadikan proses ini dalam kalimat,

“Kapital dengan demikian adalah sebuah kekuasaan yang mengatur atau memerintah buruh dan produk-produknya. Kapitalis memiliki kekuasaan, bukan karena kemampuan personal atau kualitas kemanusiaannya, tetapi lebih karena ia adalah seorang *pemilik (owner)* dari kapital. Kekuasaannya adalah kekuasaan membeli (*purchasing*) dari kapitalnya tersebut yang tak ada seorang pun bisa

menahannya."<sup>20</sup>

Cara kerja hubungan produksi kapitalis ini, secara matematis diformulasikan oleh Marx sebagai:

1.  $M \rightarrow C \rightarrow M' (\Delta M)$ , dimana:  
 $M$  = money/uang  
 $C$  = commodity/komoditi  
 $M'(\Delta M)$  = more money/lebih banyak uang.

Formula ini disebut Marx sebagai medan Sirkuit atau Sirkulasi Kapital. Misalnya, seorang kapitalis membelanjakan uangnya ( $M$ ) sebesar Rp 1.000, untuk membeli sepasang sepatu ( $C$ ) dan kemudian menjualnya kembali di pasar sebesar Rp 1.100,- ( $M'$ ). Selisih Rp 100 itulah yang disebut sebagai nilai lebih (*surplus value*) atau keuntungan (*profit*). Pertanyaannya kemudian, dari mana tingkat keuntungan ( $M'$ ) itu

<sup>20</sup> Karl Marx, *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto*, (New York: Prometheus Books, 1988), 36.

diperoleh? Kembali ke formula  $M \rightarrow C \rightarrow M$ , Marx mengatakan bahwa ketika si kapitalis membelanjakan uangnya untuk membeli komoditi ( $C$ ) maka komoditi yang dibelinya itu adalah alat-alat produksi (*means of production/MP*) dan tenaga kerja (*labor power/LP*). Hanya dengan adanya kedua jenis komoditi inilah baru kemudian si kapitalis bisa menghasilkan komoditi ( $C'$ ) yang nantinya dijual di pasar untuk menghasilkan  $M'$ . Maka sirkuit kapital itu bertransformasi menjadi:

2.  $M \rightarrow C \begin{cases} M \\ LP \end{cases} \dots P \dots C' \rightarrow M'(\Delta M)$ , dimana:  
 $MP$  = means of production (alat-alat produksi)  
 $LP$  = labor power (tenaga kerja)  
 $P$  = produksi  
 $C'$  = komoditi baru hasil dari proses produksi

Dari proses ini, kita lihat bahwa dalam kapitalisme nilai sebuah komoditi terdiri atas dua



komponen: *pertama*, nilai yang tercermin pada bahan-bahan baku (*raw material*) dan mesin yang akan digunakan dalam proses produksi; *kedua*, nilai yang dihasilkan dari adanya kerja berlebih atau *surplus labor*.<sup>21</sup> Selanjutnya dari sudut pandang sirkulasi kapital komponen pertama itu disebut kapital tetap (*constant capital* (*c*) atau *dead/stored labour*), sementara komponen kedua disebut kapital variabel (*variable capital* atau *living labour* (*v*)), di mana kapitalis membeli tenaga kerja untuk menghasilkan komoditi baru yang bisa dijual di pasar agar memperoleh keuntungan yang semakin besar, yakni komponen ketiga yang disebut nilai lebih atau *surplus value* (*s*), yang dimiliki oleh kapitalis.<sup>22</sup> Dengan demikian, nilai sebuah komoditi, apakah itu komoditi individual atau komoditi yang berhubungan satu sama lain atau bahkan sistem

<sup>21</sup> M.C. Howard and J.E. King, *The Political Economy of Marx*, (New York: New York University Press, 1985), 50.

<sup>22</sup> Howard and King, *The Political Economy*, 50.

ekonomi keseluruhan, bisa diformulasikan menjadi:

3.  $c + v + s$ , dimana:

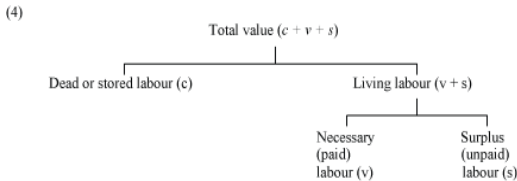
$c$  = kapital tetap (MP)

$v$  = kapital variabel (LP)

$s$  = surplus value

Marx kemudian menjelaskan lebih detail bagaimana nilai lebih itu tercipta. Menurutny, dalam proses produksi nilai yang diciptakan oleh tenaga kerja buruh ditentukan oleh kuantitas jumlah kerja atau waktu kerja buruh dalam periode waktu tertentu. Misalnya, dalam satu hari kerja kapitalis mempekerjakan buruh selama 8 jam kerja, padahal untuk menghasilkan sebuah produk hanya dibutuhkan waktu selama 4 jam kerja, sehingga terdapat kelebihan waktu 4 jam kerja. 4 jam kerja pertama, oleh Marx disebut sebagai *paid labor* yang tercermin dalam bentuk upah (*wage*). Pada empat jam pertama ini,

buruh bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kapitalis membayar upah buruh sehari sebesar Rp 10.000 per jam (Rp 80.000/hari), maka sesungguhnya upah sebesar Rp 80.000,- itu hanya senilai 4 jam kerja sehari. Sementara, 4 jam sisanya si buruh tidak dibayar oleh si kapitalis, di mana Marx menyebutnya sebagai *unpaid labor*. Inilah waktu kerja yang menghasilkan *surplus value* (nilai lebih) yang dinikmati oleh kapitalis, dan karena itu pada empat jam kedua ini disebutkan bahwa buruh bekerja untuk si kapitalis. Howard dan King<sup>23</sup> menggambarkan prosedur ini dalam bagan berikut:



<sup>23</sup> Howard and King, *The Political Economy*, 50.

Pertama, semenjak buruh terpaksa menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis di pasar kerja, maka semua kerja adalah kerja paksa dan buruh itu sendiri menjadi budak upah (*wages slavery*);<sup>24</sup> kedua, sesuatu yang bermula dari proses

<sup>24</sup> Dalam karyanya *Wage-Labour and Capital*, Marx membandingkan antara buruh upahan dengan petani hamba pada era feodalisme dan budak pada era perbudakan. Menurut Marx, yang dijual buruh upahan kepada kapitalis adalah tenaga kerja, sementara petani hamba “menjual” sebagian tenaga kerjanya (karena ia juga memiliki alat produksi) kepada tuan feodalnya, sementara budak menjual dirinya termasuk tenaga kerjanya sekali untuk selamanya kepada tuan feodalnya. Di sinilah letak perbedaan utama antara buruh upahan dengan petani hamba dan budak, bahwa si buruh memiliki kebebasan dalam makna ganda: ia bebas dari kepemilikan alat-alat produksi sekaligus ia memiliki kebebasan atas dirinya sendiri, ia tidak dimiliki oleh kapitalis perseorangan dan bebas untuk memilih kepada kapitalis mana ia harus menjual tenaga kerjanya. Tetapi karena ia harus hidup ia harus menjual tenaga kerjanya kepada si kapitalis, maka si buruh tidak bisa meninggalkan kapitalis sebagai sebuah kelas. Kata Marx, “He does not belong to this or to that capitalist, but to the capitalist class; and it is for him to find his man, i.e., to find a buyer in this capitalist class.” Inilah batasan struktural yang dihadapi buruh, yang membuatnya menjadi budak upah. Lihat Karl Marx, *Wage-Labour and Capital & Value, Price and Profit*, (New York: International Publishers, 2006), 20.

pertukaran yang setara kemudian memproduksi ketidaksetaraan. Dari sudut pandang kebebasan formal, transaksi antara buruh dan kapitalis di pasar kerja sesungguhnya berlangsung setara: yang satu menjual tenaga kerjanya sementara yang lain adalah pembelinya. Sebelum kedua belah pihak terlibat dalam proses produksi, keduanya bersepakat bahwa si kapitalis akan mempekerjakan si buruh dengan gaji sekian. Tetapi karena buruh tidak memiliki alat-alat produksi selain tenaga kerjanya, maka dalam proses produksi hubungan keduanya berlangsung secara eksploitatif. Dengan demikian, secara esensial hubungan antara buruh dan kapitalis sangat timpang di mana kapitalis mendominasi dan mengeksploitasi buruh.

Sampai di sini, kita mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem hubungan sosial produksi yang dicirikan oleh lima hal yang tak terpisahkan satu sama lain (bersifat organik): pertama, adanya produksi komoditi (*production*

*of commodities*), di mana produksi barang dilakukan bukan untuk dikonsumsi secara langsung tetapi dipertukarkan di pasar; kedua, adanya kerja-upahan (*wage-labour*) yang dieksploitasi oleh kelas kapitalis sehingga melahirkan konflik kelas yang tak terdamaikan di antara keduanya; ketiga, kehendak kelas kapitalis untuk menumpuk kekayaan tanpa batas (*acquisitiveness*) melalui eksploitasi tenaga kerja buruh dan eksploitasi terhadap alam yang melintasi batas ruang dan waktu. Inilah motivasi utama kapitalis ketika ia terjun dalam arena sirkulasi kapital, sehingga dengan demikian ketika tingkat keuntungannya menurun atau kemudian hilang maka ia akan keluar arena sirkulasi tersebut; keempat, kapitalisme dicirikan oleh organisasi yang rasional; dan kelima, sebagai konsekuensi dari kehendak untuk akumulasi kapital, kapitalisme berwatak ekspansionis dan dinamis yang membuatnya berbeda dengan sistem non-kapi-

talis yang statis.<sup>25</sup>

Watak ekspansionis dari sistem ini dimengerti dalam dua hal: pertama, ekspansi yang bersifat ekstensif, di mana kapitalisme secara konstan memperluas operasinya ke lokasi-lokasi atau dunia-dunia baru yang sebelumnya tidak mengenal sistem produksi komoditi dan selanjutnya mengintegrasikan dunia baru tersebut ke dalam jaringan kapitalisme global baik melalui instrumen ekonomi, diplomasi politik, maupun agresi militer. Kedua, ekspansi yang bersifat intensif di mana kapitalisme memperluas dirinya dengan mengomodifikasi hubungan sosial, sebuah proses di mana kapitalis atau produksi komoditi menggantikan bentuk-bentuk produksi non-kapitalis. Komodifikasi dengan demikian memperdalam penetrasi kapitalisme di dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Misalnya, barang-barang seperti udara, air,

---

<sup>25</sup> Howard and King, *The Political Economy*, 8.

dan produk intelektual yang sebelumnya bukan komoditi yang diperjualbelikan di pasar, kini melalui proses komodifikasi barang-barang tersebut telah menjadi komoditi.<sup>26</sup>

### Penjelasan Umum tentang Krisis

Seperti teorinya tentang negara yang tidak utuh, demikian juga Marx tidak menyajikan sebuah teori yang utuh dan sistematis tentang krisis kapitalisme.<sup>27</sup> Yang ada adalah

---

<sup>26</sup> Howard and King, *The Political Economy*, 6.

<sup>27</sup> Clarke menulis, "The theory of crisis has played a central role in the Marxist tradition, but at the same time it has been one of the weakest and least developed areas of Marxist theorizing. The tendency to crisis provided the starting point for the early economic studies of Marx and Engels, and it was with the problem of crisis that Marx resumed his economic studies in 1857, but nowhere in his own works does Marx present a systematic and thoroughly worked-out exposition of a theory of crisis (garis miring dari saya)." Lihat Simon Clarke, *Marx's Theory of Crisis*, (New York: Palgrave Macmillan, 1993), 7-8. Foley bahkan lebih tegas mengatakan, "Thus it seems fair to say that in the strict sense there is no Marxist theory of capitalist crisis, no model, that we can reliably view as arising from fully considered position of Marx himself." Lihat Duncan K. Foley, *Understanding Capital*

upaya kalangan Marxis yang merekonstruksi serpihan-serpihan pemikiran Marx tentang krisis yang bertebaran di berbagai karya tulis dan surat-surat kepada para sahabatnya. Dari pembacaan yang serius maka ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari teorinya tentang krisis: pertama, Marx mengatakan bahwa tidak ada krisis yang bersifat jangka panjang, atau krisis yang bersifat permanen. Krisis memang bisa menghancurkan pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh kapitalisme, tetapi pada saat yang sama krisis juga menjadi ajang bagi kapitalis yang selamat dari terjangan krisis untuk bangkit kembali dengan lebih kuat.<sup>28</sup> Inilah yang disebut Joseph A. Schumpeter sebagai momen

---

*Marx's Economic Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 145.

<sup>28</sup> Lihat James N. Devine, "An Introduction to Radical Theories of Economic Crisis," in Robert Cherry *et.al* (edited), *The Imperilled Economy Book I Macroeconomics From the Left Perspective*, (New York: The Union for Radical Political Economics, 1987), 19-31.

*creative destruction*.<sup>29</sup> Kedua, bagi Marx krisis adalah konsekuensi internal dari kapitalisme, krisis tidak disebabkan oleh hal-hal yang datang dari luar seperti bencana alam, misalnya. Karena itu, teori krisis Marxis bukan hanya bertujuan untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya krisis dalam kapitalisme, tetapi juga bagaimana memperlihatkan krisis itu terealisasi menjadi sesuatu yang tak terelakkan dalam kapitalisme.<sup>30</sup> Ketiga, krisis dengan demikian tidak akan menyebabkan kapitalisme bangkrut, tetapi merupakan momen di mana perjuangan untuk menghancurkan kapitalisme menjadi mungkin.

Sebelum lanjut, perlu kita ketahui bahwa ada tiga jenis krisis dalam kapitalisme, yakni

---

<sup>29</sup> Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, (New York: Harper Perennial Modern Thought, 2008), 83. Devine mengklaim bahwa menurut Marx "crises are restorative, causing the purging of imbalances created by accumulation." Lihat Devine, *An Introduction*, 23.

<sup>30</sup> P. Kenway, "Crises." In John Eatwell *et.al* (edited), *Marxian Economics*, (New York: W.W. Norton & Company, 1990), 10

krisis yang bersifat parsial (*partial crisis*), krisis siklus bisnis (*business cycles*), dan krisis umum (*general crisis*). Krisis parsial ini disebabkan oleh anarki dan turbulensi dalam kapitalisme, misalnya akibat kegagalan pangan, akibat panik pasar modal, jatuhnya nilai mata uang, dsb. Sementara krisis bisnis adalah krisis yang lebih bersifat periodik (muncul pada periode waktu tertentu). Misalnya, muncul dalam jangka pendek (3-4 tahun), jangka menengah (7-11 tahun), dan jangka panjang (15-25 tahun). Adapun krisis umum adalah krisis yang muncul dalam jangka panjang (46-60 tahun), yang disebabkan oleh krisis kelebihan akumulasi (*over accumulation*), dan biasanya didahului oleh percepatan akumulasi, lalu disusul oleh perlambatan, dan berakhir pada stagnasi. Jika periode stagnasi berlangsung lama maka muncul stagflasi (akumulasi stagnan yang berbarengan dengan inflasi) dan kemudian

melahirkan depresi.<sup>31</sup>

Lalu bagaimana kapitalisme terjatuh dalam krisis? Krisis adalah sebuah keadaan di mana reproduksi ekonomi dalam masyarakat mengalami gangguan yang parah, ketika kelangsungan akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi terinterupsi,<sup>32</sup> yang ditandai oleh jatuhnya tingkat keuntungan (*the fall of the rate of profit*). Penjelasan populer mengatakan bahwa krisis terjadi karena adanya kelebihan produksi (*overproduction*) yang disebabkan oleh dua hal: pertama oleh munculnya uang sebagai kapital; kedua oleh anarki produksi. Sebab pertama

---

<sup>31</sup> Anwar Shaikh, "The Falling Rate of Profit and the Economic Crisis in the U.S. *in* Robert Cherry et.al (edited), *The Imperilled*, 117. Lihat juga Howard J. Sherman, *The Roller Coaster Economy Financial Crisis, Great Recession, and the Public Option*, (New York: M.E Sharpe, 2010); Foley, *Understanding*, 141-157.

<sup>32</sup> Leo Panitch and Sam Gindin, "Capitalist Crises and the Crisis This Time," *in* Leo Panitch, Greg Albo and Vivek Chibber (edited), "The Crisis This Time," (Toronto: *Socialist Register*, 2011), 4.

dijelaskan dengan merujuk kembali ke formula  $M-C-M'$  ( $\Delta M$ ), di mana menurut formula tersebut motivasi utama kapitalis ketika menginvestasikan uangnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa terinterupsi. Rasa hausnya akan keuntungan ini bukan karena kapitalis tersebut adalah sosok yang rakus, seseorang yang secara moral tak pernah puas dengan kekayaan yang dimilikinya, tetapi karena tuntutan struktural dari sistem kapitalisme itu sendiri akibat tekanan kompetisi dengan kapitalis lainnya. Dengan demikian, sejauh tetap menguntungkan maka ia akan terus menginvestasikan uangnya guna membeli komoditi dan kemudian menjualnya kembali dengan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Jika dengan berbagai sebab komoditinya tidak bisa dijual dan tingkat keuntungannya jatuh, maka si kapitalis akan menahan atau menarik uangnya dari pasar sehingga kemudian terjadi krisis.

Sementara anarki produksi terjadi karena

dalam kapitalisme produksi komoditi tidak ditujukan untuk konsumsi sendiri melainkan untuk dijual di pasar. Di bawah tekanan kompetisi yang sangat keras untuk mereguk keuntungan di pasar, maka para kapitalis berlomba-lomba untuk memproduksi barang yang laku di pasaran. Karena tidak ada perencanaan produksi maka tak ada tangan tak terlihat yang sanggup memandu munculnya keseimbangan antara *supply* dan *demand* yang pada akhirnya memicu munculnya “ketidakseimbangan” antar-sektor. Pada saat bersamaan, karena produksinya untuk profit maka konsumen tidak diberikan akses untuk menggunakan komoditi yang bisa dijual tersebut secara gratis sehingga akibatnya terjadi kelebihan produksi. Pada titik tertentu, akibat kelebihan produksi ini harga komoditi pun jatuh di pasaran dan kapitalis tidak mampu lagi menjual barangnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Jatuhnya tingkat keuntungan menyebabkan kapitalis meninggalkan

pasar, yang jika terus berlangsung lama maka akan menyebabkan terjadinya krisis.

Dengan demikian, penjelasan dari sudut pandang kelebihan produksi ini membantah teori klasik yang diformulasikan oleh Jean-Baptiste Say, bahwa produksi akan menciptakan konsumsi. Tetapi, teori tentang pemanfaatan uang sebagai kapital dan anarki produksi ini, menurut Marx, hanya sanggup menjelaskan tentang kemungkinan terjadinya krisis dan bukan tentang krisis yang aktual (*actual crisis*).<sup>33</sup> Penjelasan ini juga hanya efektif ketika kita mengasumsikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang statis dan tertutup, padahal ciri mendasar kapitalisme adalah dinamis dan senantiasa berusaha melampaui batas-batas teritorial dan waktu. Selain itu, penjelasan tentang kelebihan produksi ini esensinya tidak berbeda dengan penjelasan kalangan non-marxis ketika

---

<sup>33</sup> Devine, *An Introduction*, 20.

menerangkan krisis, di mana krisis terjadi akibat adanya ketidakseimbangan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dalam pasar yang disebabkan oleh lemahnya tingkat permintaan (*lack of demand*). Padahal Marx sudah jelas mengemukakan bahwa esensi kapitalisme adalah hubungan sosial produksi, sehingga itu sebuah analisis yang lebih mendalam dibutuhkan untuk menjelaskan tentang krisis kapitalisme ini.

### Krisis Struktural Kapitalisme

Dalam *Manifesto Komunis*, Marx dan Engels mengatakan, sejarah seluruh masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas. Dan seperti yang telah dikemukakan di atas, ciri utama corak produksi kapitalisme adalah hubungan sosial yang eksploitatif antara kelas buruh dan kelas kapitalis. Soalnya, bagaimana kita menempatkan diktum ini dalam konteks teori krisis?

Kita telah mengetahui bahwa kapitalis



masuk ke dalam sirkuit kapital tujuannya untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya tanpa terinterupsi. Untuk mencapai tujuan ini, maka kapitalis melakukan perjuangan di dua domain, yakni domain produksi (nilai lebih/*surplus value*) di mana mereka berjuang melawan kelas buruh; dan domain sirkulasi (realisasi nilai lebih/*realization of surplus value*), ketika mereka berjuang menghadapi sesama kapitalis untuk memenangkan penguasaan pasar.

Tanda bahwa kapitalis berhasil mengalahkan kelas buruh adalah semakin meningkatnya tingkat produktivitas buruh, yang ditandai oleh semakin besarnya waktu kerja buruh yang tidak dibayar (*unpaid labor*) dibandingkan dengan waktu kerja yang dibayar (*paid labour*). Secara matematik derajat eksploitasi (*rate of exploitation/rs*) bisa diformulasikan menjadi:

$$(5) rs = \frac{\text{unpaid labour (s)}}{\text{paid labour (v)}}$$

Karena tingkat produktivitas buruh menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh, maka kapitalis harus memaksa buruh untuk bekerja lebih keras dan lebih keras lagi melalui berbagai modus, baik dengan kekerasan maupun melalui persuasi/hegemoni. Marx mengatakan, secara umum ada dua modus utama yang digunakan kapitalis untuk memicu tingkat produktivitas buruh setinggi-tingginya: pertama, melalui metode perpanjangan waktu kerja (*absolute surplus-value*); dan kedua, melalui penggunaan mesin-mesin baru dan hukum-hukum kerja baru, yang disebut Marx sebagai *relative surplus-value*.<sup>34</sup> Dalam sistem kapitalisme modern, menurut kemenangan-kemenangan yang diraih kelas buruh dalam memperpendek hari

---

<sup>34</sup> Karl Marx, *Capital Vol. I*, (New York: Penguin Books, 1990), 432. Penjelasan yang lebih populer silakan baca wawancara Muhammad Ridha dari Left Book Review (LBR) dengan Arianto Sangaji; *Arianto Sangaji: Pilihannya Sedernana, Sosialisme atau Barbarisme*, <http://indoprogress.com/lbr/?p=1478>. Diunduh pada 18 September 2013.

kerja, perbaikan tempat kerja, serta jaminan pensiun di hari tua, maka eksploitasi buruh melalui modus nilai-lebih relatif menjadi lebih dominan ketimbang bentuk nilai-lebih absolut.

Tetapi tindakan ini menyebabkan terjadinya dua keadaan: pertama, karena *paid labor* semakin kecil di hadapan *unpaid labor*, maka kemampuan buruh untuk membeli komoditi di pasar menjadi terbatas pada kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya; kedua, penggunaan teknologi baru yang semakin canggih serta organisasi kerja yang semakin efisien sebagai metode untuk mengurangi penggunaan jumlah tenaga kerja di satu sisi dan memacu tingkat produktivitas setinggi-tingginya di sisi lain, selain sukses memproduksi barang dalam jumlah yang sangat besar, juga telah menyebabkan munculnya kelompok yang disebut Robinson sebagai *underclass of supernumeraries*, yakni mereka yang terpelanting dari rantai kerja global yang kemudian membentuk *reserve army labor*.

Bertambahnya jumlah pengangguran baru ini kemudian digunakan oleh kelas kapitalis sebagai alat kontrol sosial yang represif dan otoriter terhadap kelas pekerja dalam bentuk kebijakan pengupahan yang rendah serta pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel. Tidak itu saja, kelompok *underclass of supernumeraries* ini menjadi alat untuk penindasan kultural dan ideologi guna mendehumanisasi kelas pekerja.<sup>35</sup>

Di sisi lain, tingkat keuntungan tinggi yang berhasil diraih kapitalis, juga tidak semuanya digunakan untuk konsumsi pribadinya. Untuk bisa terus eksis di dalam sirkuit kapital, maka sebagian besar dari hasil keuntungan itu harus diinvestasikan kembali, baik dalam bentuk pasif (disimpan di bank dengan keuntungan dari selisih tingkat bunga), maupun segera diinvestasikan kembali ke dalam sirkuit kapital baru. Keharusan untuk terus mereguk profit

---

<sup>35</sup> Robinson, *Latin America*, 23.

dan tekanan hukum besi kompetisi dengan sesama kapitalis di pasar, membuat kapitalis harus memproduksi semakin banyak komoditi dengan harga yang murah, harus berekspansi dan terus memodernisasi teknologi dan organisasi kerjanya. Inilah yang kemudian melahirkan kelebihan produksi (*overproduction*), yang pada akhirnya menyebabkan *lack of demand*. Singkatnya, krisis (jatuhnya tingkat keuntungan) bukan disebabkan oleh kesenjangan permintaan (*lack of demand*) melainkan oleh tekanan akan keharusan untuk mengakumulasi kapital tanpa batas (*over accumulation*), sehingga menyebabkan terjadinya ledakan dalam sirkuit kapital tersebut.

Inilah kata Marx,

“Dengan semakin menurunnya komposisi kapital variabel dalam hubungannya dengan kapital tetap, telah menyebabkan terjadinya peningkatan dalam komposisi organik kapital keseluruhan (*organic composition of the capital total*), dan yang hasil

langsungnya adalah derajat nilai-lebih, dengan level penindasan buruh dianggap sama atau bahkan semakin parah, pada akhirnya menyebabkan jatuhnya tingkat keuntungan secara umum (*falling general rate of profit*).”<sup>36</sup>

Dari uraian ini tampak bahwa krisis adalah sesuatu yang niscaya melekat pada kapitalisme, ia akan senantiasa muncul. Tetapi krisis itu sendiri tidak akan menyebabkan kapitalisme runtuh, pada perjuangan kelaslah tugas penghancuran itu diletakkan. Dan karena nilai lebih diproduksi buruh dalam proses kerja, maka perjuangan kelas dalam proses kerja itu menjadi kunci dalam menjelaskan krisis kapitalisme yang sebenarnya. Jika kelas kapitalis yang berhasil memenangkannya maka krisis hanya menjadi momen *creative destruction*,<sup>37</sup> dan sebaliknya

---

<sup>36</sup> Lihat Marx, *Capital Vol. III*, 319.

<sup>37</sup> Schumpeter dengan tepat sekali menggambarkan kondisi ini: “The fundamental impuls that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’

nya jika kelas pekerja yang memenangkannya maka kapitalisme bisa dikalahkan. Kombinasi antara kontradiksi internal yang disebabkan oleh jatuhnya tingkat keuntungan secara umum dan perjuangan kelas yang terjadi pada setiap tahap perkembangan kapitalisme ini disebut Duménil dan Lévy sebagai krisis struktural kapitalisme.<sup>38</sup>

## Krisis Pra-PD II

Jika neoliberalisme kita pahami sebagai fase terbaru perkembangan kapitalisme sekaligus merupakan respons terhadap krisis, maka perlu penjelasan tentang momen-momen krisis yang pernah muncul dalam sejarah perkembangan kapitalisme dan bagaimana respons kelas pekerja terhadap krisis tersebut. Duménil dan Lévy

---

goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of organizational organization that capitalist enterprise creates." Lihat Schumpeter, *Capitalism*, 85.

<sup>38</sup> Duménil dan Lévy, *The Crisis of Neoliberalism*, 19.

mencatat, terdapat tiga krisis besar dalam sejarah kapitalisme, yakni krisis pada tahun 1890-an, depresi besar pada tahun 1930-an, krisis pada dekade 1970-an, dan kemudian krisis neoliberalisme yang berujung pada kontraksi besar pada 2007 lalu. Krisis pada 1890-an dan 1970-an disebabkan oleh jatuhnya tren keuntungan, sementara depresi besar 1930-an dan krisis neoliberalisme, menurut keduanya, lebih disebabkan krisis hegemoni finansial.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Duménil dan Lévy, *The Crisis of Neoliberalism*, 21. Dalam sebuah wawancara, Gerard Duménil menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai krisis hegemoni finansial: "The common point between these two crises was that they occurred during periods of "financial hegemony, that is, phases in which the domination of capitalist classes, supported by its financial institutions, was unchallenged or almost so. The first financial hegemony was led by the new great bourgeoisie of the beginning of the 20<sup>th</sup> century, having to a large extent delegated managerial functions to managers (the effect of the managerial revolution). Neoliberalism can be interpreted as a second financial hegemony. In both cases, however, the existing social order was destabilized by large crises in which a broad segment of the financial system was destroyed and production plunged. The mechanisms typical of a crisis of financial hegemony

Pada setiap momen krisis itu, bentuk perjuangan kelas dan konfigurasi kekuatan di antara kelas-kelas sosial akan sangat menentukan struktur dan sistem kapitalisme selanjutnya. Pada krisis 1890an yang juga dikenal sebagai krisis finansial pertama, perjuangan kelas kala itu dimenangkan oleh kelas kapitalis karena konfigurasi kekuatan kedua kelas tersebut sangat tidak seimbang. Dalam kasus AS, gerakan kelas pekerja saat itu ditekan secara represif oleh negara sehingga warisan perjuangan dan solidaritas kelas pekerja Haymarket 1886 di

---

are distinct from those accounting for a profitability crisis. They manifest the unsustainable character of social practices leading to the removal of all limitations to the extension of capitalist domination and to the unlimited expansion of the wealth of these classes. This is the common point between the Great Depression and the current crisis. Concerning their social basis, the main difference between these two crises of financial hegemony is the larger role played by the upper fractions of managerial classes in the present crisis.” Lihat “A crisis of financial hegemony?” 14 July 2011, <http://kasamaproject.org/theory/111-a-crisis-of-financial-hegemony>. Diunduh pada 10/27/2013.

Chicago, AS, menjadi sangat lemah.<sup>40</sup>

Hasil dari kemenangan kapitalis ini

---

<sup>40</sup> Kasus Haymarket, atau yang terkenal dengan sebutan “Haymarket Tragedy” bermula dari seruan agar buruh melakukan pemogokan umum pada 1 Mei 1886, yang menuntut 8 jam kerja. Pada hari pertama, sekitar 90.000 orang berdemonstrasi di jalanan dan 40.000 orang lainnya melakukan pemogokan. Pada hari ketiga pemogokan, polisi membubarkan secara paksa aksi ini yang menyebabkan enam orang terbunuh. Tanpa rasa takut, keesokan harinya pada tanggal 4 Mei, kembali ribuan orang melakukan *rally* di Haymarket Square, di Chicago. Awalnya, telah terjadi negosiasi damai antara walikota Chicago, Carter Harrison dengan massa buruh, tetapi polisi yang memiliki konflik dengan sang walikota tiba-tiba memprovokasi massa buruh dengan melempar bom ke tengah-tengah massa dan kemudian secara membabi-buta menembaki massa aksi. Delapan orang terbunuh dan 200 lainnya mengalami luka-luka dalam kejadian, yang juga dikenal dengan nama “Chicago Eight” tersebut. Setelah peristiwa ini, politik AS mulai mengenal kosakata “Bahaya Merah Pertama,” yang menandai konflik tak berkesudahan antara buruh-pengusaha-negara. Lihat Coen Husain Pontoh, *Esensi Mayday*, 29 April 2008, <http://indoprogress.com/esensi-mayday/>, diunduh pada 4 November 2013; *Haymarket Square Riot*, [http://www.encyclopedia.com/topic/Haymarket\\_Square\\_riot.aspx](http://www.encyclopedia.com/topic/Haymarket_Square_riot.aspx), diunduh pada 4 November 2013. Untuk diskusi lebih detail mengenai hubungan negara dan kapital dengan studi kasus AS, lihat Leo Panitch and Sam Gindin, *The Making of Global Capitalism*, (London: Verso, 2012).

memunculkan respons dalam bentuk revolusi korporasi, revolusi finansial, dan revolusi manajerial yang wujud utamanya adalah dipisahkannya pemilik kapital (*capital ownership*) dari manajemen (*management*).<sup>41</sup> Melalui revolusi ini ekonomi AS kembali bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Sebagai contoh, jika pada 1870 tingkat produktivitasnya masih 14 persen lebih rendah dari Inggris, pada akhir abad ke-19 tingkat pertumbuhannya menjadi 7 persen lebih besar, dan pada 1913 meningkat lagi menjadi 20 persen lebih besar dari Inggris, serta dua kali lebih besar ketimbang Jerman dan Prancis. Dalam hal sumbangan kepada produksi dunia, pada 1870 *share* AS sudah mencapai 23 persen, lalu mencapai 30 persen pada 1900, dan meningkat lagi menjadi 36 persen pada 1913. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan sumbangan Inggris dan Jerman dijadikan satu.

---

<sup>41</sup> Diskusi lebih detil soal ini, lihat Duménil dan Lévy, *The Crisis of Neoliberalism*.

Perusahaan-perusahaan berskala besar, juga lahir pada periode ini. Misalnya, hampir 30 persen dari 500 daftar perusahaan yang dirilis majalah *Fortune* pada 1990, didirikan antara tahun 1880 dan 1910.<sup>42</sup>

Menjelang periode depresi besar 1930-an, capaian pertumbuhan ekonomi tinggi pasca-krisis 1890-an juga berarti semakin banyak kelas buruh yang terserap ke dalam industri. Namun ketika krisis meledak pada tahun 1932, tercatat perdagangan dunia jatuh sebesar 1/3, dan konsekuensinya pada tahun 1933 jumlah buruh AS berkurang hingga mencapai 3 juta orang dari yang lima tahun sebelumnya mencapai 5 juta orang. Pada tahun 1939, angka pengangguran di AS bahkan mencapai 15 persen.<sup>43</sup> Namun, berbeda dengan krisis 1890-an,

---

<sup>42</sup> Lihat Leo Panitch and Sam Gindin, *The Making of Global Capitalism*, (London: Verso, 2012), 28.

<sup>43</sup> [http://www.glovesoff.org/features/gjamerica\\_1.html](http://www.glovesoff.org/features/gjamerica_1.html), diunduh pada 19 September 2013.

depresi besar ini ditandai oleh perjuangan kelas yang sangat sengit antara kelas buruh dan kelas kapitalis, penaklukan-penaklukan imperialis dan perlawanan-perlawanan anti-kolonial.<sup>44</sup> Muncul pemogokan di hampir seantero negeri AS. Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan menuntut agar mereka tidak dipaksa menanggung derita akibat dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh bangkrutnya sistem keuangan saat itu. Brenner mengatakan, tahun 1934 sebagai tahun pemogokan massal yang sukses dari buruh suku cadang mobil di Toledo; pemogokan massal di Minneapolis dan San Francisco yang dipicu oleh buruh kusir dan dermaga pelabuhan, serta pemogokan 400.000 buruh tekstil di sepanjang daerah pesisir Timur.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Robinson, *Latin America*, 9.

<sup>45</sup> Aaron Brenner, "Strikes: Theory And History," in Aaron Brenner, Benjamin Day, Immanuel Ness (editors), *The Encyclopedia of Strikes In American History*, (New York: M.E. Sharpe, 2009), 10.

Menghadapi demonstrasi buruh yang terus membesar dan semakin militan tersebut, Presiden F.D. Roosevelt terpaksa mengakomodasinya melalui penerapan kebijakan *New Deal*, yang mengikuti garis Keynesianisme. Dalam salah satu pernyataannya, Roosevelt mengatakan bahwa "hubungan antara negara juga harus direformasi untuk mencegah terjadinya revolusi dan perang."<sup>46</sup> Intervensi pemerintah dalam pasar ini dimulai dengan diundangkannya Glass-Steagall Act (1933) yang dimaksudkan untuk meregulasi sektor perbankan, dengan cara membatasi aktivitas perbankan sekuritas serta memisahkan bank komersial dari bank investasi. Selanjutnya, pemerintah mengundang The National Industrial Recovery Act/NIRA (1933) yang menjamin adanya tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*) antara buruh dan manajemen. Tak lama berselang, pada 1935, atas inisiatif Senator Robert Wagner, pemerintah meloloskan

---

<sup>46</sup> Panitch and Gindin, *The Making*, 56.

National Labor Relations Act/NLRA (juga dikenal sebagai the Wagner Act) yang mewajibkan kapitalis untuk melakukan tawar-menawar dengan serikat buruh yang didukung oleh mayoritas anggotanya.<sup>47</sup>

Tentu muncul pertanyaan, “Kok bisa, dalam situasi pengangguran besar-besaran yang mestinya melemahkan daya tawar serikat buruh yang terjadi malah sebaliknya, serikat buruh semakin kuat dan militan?” Brenner berargumentasi bahwa meluasnya aksi-aksi pemogokan saat itu beriringan dengan meluasnya kepemimpinan kalangan radikal dalam pemogokan-pemogokan tersebut, terutama dari kalangan sosialis, komunis serta beberapa elemen pendukung New Dealers. Misalnya, kelompok Trotskys, termasuk James P. Cannon, Ray Dunne, dan Carl Skoglund memainkan peranan penting dalam memimpin pemogokan Teamster

---

<sup>47</sup> Panith and Gindin, *The Making*, 57.

di Minneapolis pada 1934. Dalam pemogokan di Toledo pada tahun yang sama, kader Partai Buruh Amerika yang beraliran sosialis di bawah pimpinan A.J. Muste, mengorganisir buruh pengangguran (*unemployed workers*) untuk berpartisipasi dalam pemogokan massa. Karena peran dari kader-kader komunis dan sosialis ini, John L. Lewis, pemimpin Congress on Industrial Organizations (CIO), serikat buruh paling dinamis saat itu, kemudian merekrut mereka dalam kerja-kerja pengorganisasian kampanye CIO.<sup>48</sup> Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa krisis ekonomi menyediakan momentum pada gerakan buruh untuk berlawanan, tetapi tanpa adanya kepemimpinan ideologi, politik, dan organisasi yang kuat maka gerakan buruh tidak mungkin muncul sebagai kekuatan yang memiliki daya tawar yang kuat.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Aaron Brenner, *Strikes*, 10.

<sup>49</sup> Nanti kita akan lihat bagaimana ketika terjadi krisis pada akhir dekade 1960an dan pertengahan dekade 1970an,



Dari hasil perjuangan kelas yang sengit ini (walaupun tidak sanggup menghancurkan kapitalisme), terjadi kompromi antara kelas buruh dan kapital yang difasilitasi oleh negara. Duménil dan Lévy mencatat kompromi itu menghasilkan beberapa point kesepakatan: *pertama*, penghormatan yang sangat luas terhadap inisiatif swasta, dan aturan-aturan dasar permainan kapitalis; *kedua*, intervensi negara untuk mengontrol situasi makro ekonomi, pertumbuhan (yang berarti diikuti dengan seperangkat pembatasan terhadap inisiatif swasta yang berkaitan dengan keuangan dan sejumlah kecil industri), dan kemajuan teknologi; dan *ketiga*, menjamin perhatian terhadap kondisi-kondisi kerja dan perburuan, termasuk peningkatan

---

justru gerakan buruh begitu lemah karena tidak adanya kepemimpinan politik, ideologi, dan organisasi yang jelas dan kuat.

daya beli dan perlindungan sosial.<sup>50</sup> Tidak itu saja, dengan kekuatan politik yang dimiliki oleh serikat buruhnya dan dipandu oleh peningkatan kesadaran sosialnya, para buruh ini kemudian memilih para pemimpin politik baru baik di tingkat lokal maupun nasional, yang kemudian mengadopsi legislasi sosial yang melindungi mayoritas rakyat Amerika dari perubahan-perubahan kehidupan ekonomi, termasuk jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan standar kerja yang adil.<sup>51</sup> Inilah kesimpulan Brenner:

“Pemogokan-pemogokan pada dekade 1930-an telah mentransformasikan gerakan buruh Amerika dan mendemokratisasikan masyarakat Amerika. Dalam konflik mereka belajar siapa yang mengontrol ekonomi dan kehidupan politik Amerika dan menyadari potensi dari aksi kolektif mereka

---

<sup>50</sup> Gérard Duménil and Dominique Lévy, *Capital Resurgent Roots of the Neoliberal Revolution*, (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 13.

<sup>51</sup> Aaron Brenner, *Strikes*, 11.

dalam mengubah keseimbangan kekuasaan di tempat kerja.”<sup>52</sup>

## Krisis Struktural Pasca-PD II

Dengan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi pada 1937 dan mencapai puncaknya pada pasca Perang Dunia II, kompromi kelas ini menjadi fondasi dari apa yang disebut kapitalisme yang teregulasi (*regulated capitalism*) atau keynesianisme-liberal atau kapitalisme negara (*state-capitalism*), menggantikan model kapitalisme yang bisa meregulasi dirinya sendiri (*self-regulating economic system*). Freeman menyebut periode ini sebagai periode “bisnis besar, serikat buruh besar, dan negara besar.”<sup>53</sup> Produk

---

<sup>52</sup> Aaron Brenner, *Strikes*, 11.

<sup>53</sup> Joshua B. Freeman, *Working Class New York Life and Labor Since World War II*, (New York: The New Press, 2000), 99. Duménil dan Lévy mengatakan bahwa periode pasca-PD II hingga akhir tahun 1970an dikenal sebagai dekade kompromi Keynesian yang ditandai oleh angkatan kerja penuh (*full employment*), perlindungan kesejahteraan sosial (*social welfare protection*), dan akses universal terhadap

Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP) AS pasca-perang setara dengan GDP seluruh negara di dunia dijadikan satu. Pada 1950, GDP AS delapan kali lebih besar dibandingkan dengan seluruh negara kapitalis lainnya.<sup>54</sup> Periode antara 1940 hingga akhir 1960 ini dikenal dengan sebutan “Zaman emas kapitalisme/*Golden Age of capitalism*.”<sup>55</sup>

Dari sudut pandang kelas pekerja, periode

---

pendidikan dan pelayanan kesehatan (*universal access to education and health care*). Tetapi, masih menurut Duménil dan Lévy, ada alasan lain di balik tetap dipertahankannya kompromi ini yakni guna menunjukkan kedigdayaan kapitalisme dalam perjuangannya melawan komunisme. Lihat Gérard Duménil and Dominique Lévy, *Capital Resurgent*, 1.

<sup>54</sup> Albert Szymanski, “The Decline and Fall of the U.S. Eagle,” in David Mermelstein (edited), *The Economic Crisis Reader Understanding Depression, Inflation, Unemployment, Energy, Food, Wage-Prices Controls, and Other Disorders of American and World Capitalism*, (New York: Vintage Books, 1975), 66.

<sup>55</sup> Ray Kiely, *The New Political Economy of Development Globalization Imperialisme Hegemony*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 47.

keemasan ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas kaum buruh. Ekonom Rick Wolff mengatakan untuk periode 150 tahun dari 1820 hingga 1970, rata-rata produktivitas buruh meningkat setiap dekadanya. Jumlah *output* komoditi yang diproduksi setiap jamnya juga turut meningkat akibat buruh semakin terlatih, penggunaan mesin-mesin yang semakin canggih, dan pengawasan terhadap proses kerja yang semakin ketat sehingga buruh harus bekerja lebih keras dan lebih cepat lagi dari sebelumnya. Karena produktivitas meningkat pesat dan tingkat keuntungan yang diraih kapitalis sangat tinggi, maka pada tahun yang sama upah riil juga meningkat setiap dekadanya.<sup>56</sup> Tidak heran jika kemudian buruh AS mengukur pencapaian hidup mereka dari sudut pandang konsumsi yang juga terus meningkat. Sukses berarti punya mobil, bisa

---

<sup>56</sup> Rick Wolff, *Capitalism Hits the Fan*, <http://rdwolff.com/sites/default/files/attachment/4/03Wolff.pdf>, diunduh pada 21 September 2013.

tamasya ke luar negeri, mampu menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan lebih baik dari generasi orangtuanya, dsb. Dari sudut pandang kelas buruh, periode ini juga dikenal sebagai “*the Golden Age of the U.S. Working Class*”/zaman keemasan kelas pekerja AS.” Keadaan ini kemudian memperkuat keyakinan bahwa buruh dan kapitalis harus merayakan keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini secara bersama-sama. Jika buruh terus menuntut kenaikan upah setiap saat maka itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi tersebut, kapitalis merugi, dan akhirnya kerugian itu akan menimpa mereka pula. Inilah dasar kolaborasi kelas itu.

Namun demikian, dalam politik kolaborasi kelas ini tidak berarti serikat buruh sama sekali berdiam diri alias tidak melakukan demonstrasi sekalipun. Bahkan, setelah PD II usai pada 1945, gelombang pemogokan buruh kembali bergolak di beberapa kota di AS, setelah sempat vakum akibat kesepakatan untuk tidak mogok

pada masa perang. Gelombang pemogokan terbesar terjadi pada 1946, baik pemogokan di tingkat pabrik hingga tingkat nasional, yang kemudian memunculkan keresahan di kalangan borjuasi AS. Apa yang menjadi problem dari politik kolaborasi kelas ini adalah orientasi dan tujuan dari aksi-aksi tersebut. Di bawah pengaruh American Federation of Labor (AFL) yang mewarisi garis politik moderat dan ekonomistik dari pemimpin mereka yang sangat kharismatik Samuel Gompers, kelas buruh melalui serikat buruhnya semakin menjauhi isu-isu politik kelas dan kian terkonsentrasi pada isu-isu ekonomi yang pragmatis, seperti tuntutan peningkatan upah, pengurangan jam dan hari kerja, serta jaminan kesehatan di masa pensiun. Dari segi strategi dan taktik pergerakan, serikat buruh kini lebih mengandalkan pada praktik lobi ketimbang pemogokan dan aksi-aksi mobilisasi kelas

buruh,<sup>57</sup> sehingga berimbas pada semakin rendahnya tingkat solidaritas di kalangan kelas buruh karena makin kurangnya pengalaman perjuangan bersama.

Masalah lainnya dari politik kolaborasi kelas ini, negara Keynesian yang bertindak à la Bonapartis<sup>58</sup> ternyata sama sekali tidaklah netral. Menurut Marx, negara tidak mungkin memberikan sesuatu kepada salah satu kelas tanpa mengambil apa yang dimiliki kelas lainnya.<sup>59</sup> Melalui beragam lobi-lobi politik dan

---

<sup>57</sup> Bill Fletcher, *Can U.S. Workers Embrace Anti-Imperialism?* <http://monthlyreview.org/2003/07/01/can-u-s-workers-embrace-anti-imperialism>, diunduh pada 21 September 2001.

<sup>58</sup> Secara singkat, negara Bonapartis adalah sebuah keadaan di mana Negara kapitalis bisa bertindak independen dari kepentingan kelas-kelas yang ada dalam masyarakat. Untuk pembahasan lebih jauh soal ini, lihat Coen Husain Pontoh, *Teori Negara Marxis: Eksplorasi Atas Pemikiran Friedrich Engels*, yang akan terbit dalam sebuah buku kumpulan tulisan mengenai Pemikiran Friedrich Engels.

<sup>59</sup> Karl Marx, *The 18<sup>th</sup> Brumaire of Louis Bonaparte*, (New York: International Publishers, NY, 1998), 133.

propaganda besar-besaran melalui koran, televisi, dan iklan-iklan bahwa gerakan buruh telah disusupi oleh “provokator-provokator komunis,” kalangan borjuasi kemudian menuntut agar Wagner Act (1935) direformasi karena dianggap terlalu liberal. Hasilnya, pada Juni 1947, presiden Harry S. Truman mengesahkan undang-undang yang disebut the Taft-Hartley Act. Undang-undang ini dimaksudkan untuk membatasi gerak-gerik serikat buruh, yang mengakibatkan kemampuan mereka untuk mengorganisasi pemogokan menjadi melemah baik di tingkat pabrik dan terlebih di tingkat nasional.<sup>60</sup>

Sejak saat itu, akibat dari politik kolaborasi kelas ini kelas pekerja terus-menerus menderita pukulan-pukulan dari kelas kapitalis dan negara. Selanjutnya, sebagai bagian dari proses depolitisasi dan deradikalisasi gerakan buruh, serikat

---

<sup>60</sup> Nicola Pizzolato, “Strikes In The United States Since World War II,” in Aaron Brenner, Benjamin Day, Immanuel Ness (editors), *The Encyclopedia*, 228.

buruh-serikat buruh dan para pemimpin buruh radikal dan berorientasi Marxis dieliminasi dari keanggotaan dan struktur kepemimpinan serikat buruh. Dengan absennya kepemimpinan ideologis dan politik kelas ini, serikat buruh AS dalam perkembangannya menjadi sangat oportunis dan pragmatis. Misalnya, serikat buruh terbesar AS, AFL-CIO, turut aktif dalam membela kebijakan-kebijakan imperialis AS dalam menjatuhkan atau mengorkestrasi penggulingan pemerintahan-pemerintahan yang anti dan tidak bersahabat terhadap kepentingan akumulasi kapital global, serta menolak bersolidaritas terhadap gerakan kelas pekerja di seluruh dunia yang menentang eksploitasi kapital. Garis politik AFL-CIO ini oleh sarjana perburuhan terkemuka Kim Scipes sebut sebagai “*Labor Imperialism*.”<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Kim Scipes mengatakan bahwa “*Labor Imperialism*” ini sejatinya tidak dimulai ketika AFL dan CIO melakukan merger pada 1955, tetapi sudah terjadi sejak AFL yang dipimpin oleh Samuel Gompers yang moderat pada awal abad ke-20 sebelum PD I. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat

Namun masa-masa keemasan kapitalisme itu ada batasnya. Bayangan menakutkan akan terulangnya kembali krisis semakin menjadi kenyataan. Ekonom Marxis Fred Moseley, melalui olah data dari tahun 1947-1982, menemukan bahwa komposisi kapital meningkat sebesar 62 persen selama periode studi, yakni dari 3.46 pada 1947 menjadi 5.59 pada 1982. Jika diukur dalam periode rata-rata lima tahunan, maka komposisi kapital meningkat sebesar 46 persen selama periode ini, yakni dari rata-rata 3.62 pada periode 1947-51 menjadi rata-rata 5.29 pada periode 1978-82. Sementara itu tingkat nilai lebih meningkat 35 persen selama periode studi, yakni dari 1.40 pada 1947 menjadi 1.89 pada 1982. Fakta ini, menurut Moseley sesuai dengan apa yang diprediksi oleh teori

---

Kim Scipes, "Labor Imperialism Redux?: AFL-CIO's Foreign Policy Since 1995," in *Monthly Review An Independent Socialist Magazine*, Vol. 57, Issue 01 (May), 2005, <http://monthlyreview.org/2005/05/01/labor-imperialism-redux-the-afl-cios-foreign-policy-since-1995>. Diunduh pada 5 Oktober 2013.

Marx mengenai jatuhnya tingkat keuntungan secara umum. Jika menggunakan ukuran periode rata-rata lima tahunan, maka tingkat nilai lebih meningkat 23 persen dari 1.42 pada 1947-51 menjadi 1.75 pada 1978-82. Dari data ini maka tampak bahwa peningkatan komposisi kapital secara signifikan lebih besar ketimbang peningkatan tingkat nilai lebih, sehingga tingkat keuntungan jadinya menurun sebesar 17 persen selama periode tersebut, yakni dari 0.40 pada 1947 menjadi 0.34 pada 1982. Jika dihitung menurut rata-rata lima tahunan, maka tingkat keuntungan itu jatuh sebesar 15 persen, yakni dari 0.39 pada 1947-51 menjadi 0.33 pada 1978-82.<sup>62</sup>

Studi lebih baru dari Went mengonfirmasi hasil studi Moseley tersebut, di mana akibat dari jatuhnya tingkat keuntungan secara umum ini, maka pada pertengahan dekade 1960an, pertumbuhan ekonomi AS mulai melambat (tabel

---

<sup>62</sup> Fred Moseley, "Marxian Crisis Theory and the Postwar U.S. Economy." In Robert Cherry, *et.al.*, *The Imperilled*, 108.

1), demikian juga dengan tingkat produktivitas (tabel 2), sementara tingkat pengangguran meningkat (tabel 3)<sup>63</sup> yang menyebabkan terjadinya stagflasi, pengangguran, krisis energi, krisis neraca pembayaran dan fiskal, serta meningkatnya utang luar negeri, yang kemudian memaksa pemerintahan Richard Nixon di AS untuk mengubah nilai standar emas ke dalam dolar.<sup>64</sup> Dalam kasus New York, sebagai negara bagian AS yang merupakan pusat industri manufaktur, periode setelah pertengahan 1960an ditandai oleh apa yang disebut sebagai deindustrialisasi. Menurut laporan the Temporary Commission on City Finances, sektor manufaktur kehilangan 12.159 pekerjaan berbasis ekspor pada 1965-69 dan meningkat menjadi 41,987 pada 1969-73—sebelum terjadinya resesi besar 1974-75. Sektor transportasi sempat memperoleh keuntungan

<sup>63</sup> Lihat Robert Went, *Globalization Neoliberal Challenge, Radical Response*, (London: Pluto Press, 2000), 81-82

<sup>64</sup> Robinson, *Latin America*, 13.

pada 1965-69 khususnya di sektor transportasi udara, tapi secara keseluruhan kehilangan pekerjaan sebanyak 10.226 pada periode 1969-73. Demikian juga dengan sektor finansial yang bisa menampung pekerja sebanyak 59,242 dari 1965-69, namun pada 1969-73 kehilangan pekerjaan sebanyak 18,657.<sup>65</sup>

**Tabel 1**

**Rata-rata pertumbuhan rill tahunan GNP di enam negara industri maju (%)**

	1950-73	1973-79	1979-83
AS	2.2	1.9	0.7
Inggris	2.5	1.3	0.4
Prancis	4.1	2.6	1.1
Jerman	5.0	2.6	0.5
Italia	4.8	2.0	0.6
Jepang	8.4	3.0	3.9

<sup>65</sup> Kim Moody, *From Welfare State To Real Estate Regime Change in New York City, 1974 to the Present*, (New York: The New Press, 2007), 14

**Tabel 2**

**Tingkat produktivitas per pekerja per tahun (1950-81)**

		1950-73	1973-81
Prancis	Agrikultur	5.6	3.5
	Industri	5.2	3.2
	Servis	3.0	1.6
Jerman	Agrikultur	6.3	3.9
	Industri	5.6	2.6
	Servis	3.0	1.6
Jepang	Agrikultur	7.3	1.1
	Industri	9.5	4.7
	Servis	3.6	1.9
Inggris	Agrikultur	4.7	2.8
	Industri	2.9	1.8
	Servis	1.6	0.7
AS	Agrikultur	5.5	1.6
	Industri	2.4	-0.2
	Servis	1.8	0.1

**Tabel 3**

**Rata-rata pengangguran**

	1952-64	1965-73	1973-79	1980-83
AS	5.0	4.5	6.5	8.4
Inggris	2.5	3.2	4.6	9.0
Prancis	1.7	2.4	4.2	7.6
Jerman	2.7	0.8	3.1	5.7
Italia	5.9	3.4	6.0	8.6
Jepang	1.9	1.3	1.8	2.3

Menjelang dekade 1970an, dunia mema-suki apa yang disebut Moody sebagai titik balik dari zaman keemasan kapitalisme. Pada 1971, rejim nilai tukar Bretton Woods bangkrut dan Jepang serta Jerman kini menjadi kompetitor ekonomi terkuat bagi AS. Dan pada 1975-75, dunia mengalami resesi yang dimulai dengan terjadinya stagnasi ekonomi di negara-negara



industri maju.<sup>66</sup>

“Tahun 1975 merupakan titik balik bagi New York City. Pada tahun tersebut pemimpin-pemimpin ekonomi dipaksa untuk memilih pemimpin yang bisa mengubah prioritas-prioritas kota yang telah berlangsung selama ini. Dan selanjutnya, tenaga kerja yang ada di kota ini bakal menderita; upah riilnya bakal jatuh, semakin kecil tingkat pendapatan yang bisa didistribusikan kepada kalangan miskin; pajak mesti dipotong; pinjaman untuk pembayaran yang dikeluarkan harus dihapus. Secara keseluruhan tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan anggaran kota dan merestorasi akses publik kepada pasar.”<sup>67</sup>

Dunia kini memasuki apa yang kemudian disebut sebagai era kapitalisme-neoliberal yang menggantikan rejim keynesianisme-liberal. Menurut Tabb, pada era baru ini

---

<sup>66</sup> Lihat Kim Moody, *From Welfare State*, 15.

<sup>67</sup> Kim Moody, *From Welfare State*, 30-31.

terjadi pergeseran rezim dari reformisme-liberal ke neo-konservatif reprivatisasi, dari rezim redistribusi ke rezim yang menyerahkan seluruh urusan hidup manusia kepada pasar, dari perubahan berdasarkan pada tekanan massa kepada penggunaan tenaga “ahli” dalam mempercepat perubahan tersebut.<sup>68</sup>

### **Neoliberalisme Sebagai Proyek Kelas**

Paparan di atas mengonfirmasi tesis bahwa neoliberalisme adalah fase terbaru dari perkembangan kapitalisme. Sebagai hasil dari krisis dan dinamika internal kapitalisme, neoliberalisme muncul untuk merespons krisis struktural kapitalisme pasca-PD II yang didukung oleh kolaborasi kelas. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem baru ini adalah untuk merestorasi keuntungan kelas kapitalis melalui ekspansi dan

---

<sup>68</sup> William K. Tabb, *The Long Default New York City and the Urban Fiscal Crisis*, (New York: Monthly Review Press, 1982), 15.

akumulasi kapital ke seluruh penjuru dunia dan sendi-sendi kehidupan yang sebelumnya belum terkomodifikasi.

Proyek restorasi ini menemukan momentumnya karena kekuatan kelas buruh telah melemah sebagai hasil dari politik kolaborasi kelas yang mereka terapkan. Secara prinsipil tujuan itu bisa dicapai melalui dua cara esensial berikut: Pertama, reorganisasi dan restrukturisasi (re-res) produksi kapitalisme di mana rezim kompromi Keynesian harus dihancurkan dan kembali ke tatanan lama kapitalisme pra-keynesianisme. Kekuasaan kelas buruh yang mampu mengimbangi kekuasaan kelas kapitalis dianggap sebagai sumber penghambat produksi dan realisasi nilai lebih. Tujuan dari re-res ini adalah menggeser komposisi/konfigurasi kekuasaan kelas menjadi berpihak kepada kelas kapitalis. Dalam pergeseran konfigurasi kekuasaan kelas ini, Duménil dan Lévy mengingatkan bahwa kelas kapitalis yang paling berkepentingan dan

diuntungkan dari proyek ini adalah lapis teratas dari kelas kapitalis tersebut, yakni kalangan kapital keuangan (*finance capital*). “*Finance*” di sini tidak secara sederhana merujuk pada sektor finansial dalam ekonomi, tapi pada kompleks kelas atas kapitalis (*upper capitalist classes*), yang kepemilikannya mewujud dalam pemilikan sekuritas (pembagian saham, *bond*, *bank-banks*, dan obligasi pemerintah, dsb), dan lembaga-lembaga keuangan (bank sentral, bank, dan lembaga-lembaga keuangan non-bank seperti *funds*, dsb).<sup>69</sup> Melalui neoliberalisme, kelas ini hendak menegakkan apa yang disebut sebagai “hegemoni finansial.”<sup>70</sup> Di sini kepentingan kapital keuangan dianggap sebagai representasi dari kepentingan kapital secara keseluruhan, sehingga cara pandang mereka atas dunia dianggap sebagai yang paling tepat dan visioner.

---

<sup>69</sup> Lihat Duménil and Lévy, *The Crisis of Neoliberalism*, 16.

<sup>70</sup> Duménil and Lévy, *The Crisis of Neoliberalism*, 18.

Kedua, re-res produksi ini tidak akan berjalan maksimal jika nilai-lebih tidak bisa direalisasikan secara maksimal baik secara ekstensif dan intensif. Oleh karena itu, rezim neoliberalisme harus menghancurkan seluruh tembok-tembok pembatas ekspansi dan akumulasi kapital tersebut, baik pembatas yang datang dari negara maupun komunitas. Rezim neoliberal ini menganggap bahwa rezim keynesian dan sosial-demokrasi di negara-negara kapitalis maju, dan rezim-rezim sosialis serta rezim negara pembangunan (*developmental state*) di negara-negara kapitalis miskin, tidak lagi kompatibel dengan proyek neoliberal ini. Bentuk-bentuk negara tersebut dianggap telah menjadi parasit yang menggerogoti proses akumulasi kapital melalui praktik *rent seeking*, penerapan serangkaian kebijakan untuk mengontrol pergerakan kapital lintas ruang (*space*) dan waktu (*time*), serta intervensinya terhadap mekanisme pasar. Bagi rezim neoliberal, apapun alasannya,

segala bentuk intervensi terhadap pasar adalah buruk.<sup>71</sup>

**Tabel 4: Restrukturisasi kapital dan restrukturisasi hegemoni**

skala paradigmatik operasi kapital uang kapital produktif			konsep hegemoni
1820s-1870s	Kosmopolitan	lokal	liberal internasionalisme
1870s-1914	Kosmopolitan	nasional	
1920s	Kosmopolitan	nasional	kapitalisme negara
1930s	Nasional	nasional	
1950s	Nasional	Atlantik	korporat liberalisme
1960s dan 1970s	Kosmopolitan	Atlantik	
1980s dan 1990s	Kosmopolitan	global & regional	neoliberalisme

Sumber: Henk Overbeek and Kees van der Pijl, 1993, 7.

<sup>71</sup> Telah ada banyak kajian yang membuktikan bahwa propaganda anti-negaranya rezim neoliberal sesungguhnya adalah mitos. Apa yang sebenarnya terjadi adalah rezim neoliberal memutar balik haluan negara, dari yang sebelumnya membatasi pergerakan kapital, menoleransi kekuatan kelas buruh, dan mendistribusi tingkat keuntungan kepada kalangan masyarakat miskin, menjadi melayani dan memfasilitasi kepentingan kapital. Tanpa peran aktif negara, baik dengan cara-cara persuasi maupun represi brutal, maka seluruh penerapan kebijakan neoliberal tidak akan berjalan efektif.

Dalam hal kebijakan proyek mendasar neoliberalisme mencakup dua fase: pertama, apa yang terkenal dengan sebutan “stabilisasi,” atau paket kebijakan fiskal, moneter, pertukaran dan serangkaian tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi-makro dalam negeri negara yang bersangkutan. Kebijakan stabilisasi ini meliputi penghapusan subsidi untuk bahan makanan, transportasi, dan barang-barang publik lainnya; pemotongan pekerjaan publik; dan tindakan-tindakan pengurangan belanja sosial, seperti pemotongan layanan untuk kesehatan dan pendidikan. Stabilisasi ini kemudian diikuti tahapan *kedua* yang dikenal sebagai penyesuaian struktural yang meliputi: (1) liberalisasi perdagangan dan keuangan, melalui pembukaan ekonomi pasar dunia; (2) deregulasi, yang menghapuskan keterlibatan negara dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan dalam fungsinya sebagai mediator hubungan buruh-kapital; dan (3) privatisasi

badan-badan ekonomi publik (badan usaha milik negara dan bentuk-bentuk usaha koperasi) karena dianggap menghambat akumulasi kapital; *ketiga*, restrukturisasi hubungan buruh-kapital yang esensinya adalah mencetak buruh murah, disiplin dan fleksibel sehingga siap untuk menghadapi tuntutan dan kebutuhan korporasi transnasional. Restrukturisasi ini mencakup buruh kontrak dan sub-kontrak, *outsourcing* (alih-daya), kerja paruh-waktu (*part-time*); kerja informal (*informal work*), kerja-rumahan (*home-work*), bekerja di rumah (*telecommuting*); dihidupkannya kembali hubungan kerja patriarkal di tempat kerja (*patriarchal workshops*) dan unit-unit kerja keluarga (*family labor units*) dalam bentuk hierarki kerja berdasarkan gender dan ras; tempat kerja yang buruk (*sweatshops*); dan bentuk-bentuk lain hubungan kerja yang menindas.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Robinson, *Latin America*, 19 and 23.

Dengan propaganda masif melalui institusi pendidikan, publikasi buku, jurnal, pidato-pidato para pejabat publik, hingga pemberitaan media massa mengenai ideologi abstrak dan serangkaian kebijakan ekonominya, rezim neo-liberal menjanjikan sebuah tatanan kehidupan yang lebih bebas dengan tingkat kemakmuran yang tinggi. Menurut keyakinan ini semakin seluruh sumber daya ekonomi terintegrasi ke dalam pasar maka semakin baik pula kehidupan itu sendiri.

Namun demikian, kendati seluruh aspek kehidupan semakin terkomodifikasi dan seluruh wilayah di permukaan bumi semakin terintegrasi ke dalam pasar, serta neoliberalisme menjadi ideologi yang paling hegemonik dalam sejarah perkembangan ideologi ekonomi-politik dunia, janji-janji kehidupan yang lebih baik bagi semua yang berpartisipasi didalamnya ternyata hanya sebatas janji. Dari segi pergerakan kapital, misalnya, mayoritas investasi asing langsung/

*foreign direct investment* tetap berputar di kalangan negara-negara kapitalis maju;<sup>73</sup> jurang kesenjangan antar kaya-miskin dalam satu negara dan kesenjangan antar negara maju dan miskin terus menganga lebar;<sup>74</sup> jumlah tenaga kerja informal (*precarious work*) semakin bertambah banyak berbanding terbalik dengan jumlah pekerja formal;<sup>75</sup> kaum miskin yang sebenarnya merupakan korban pembangunan bukannya dibela malah dikriminalkan;<sup>76</sup> demikian juga ke-

---

<sup>73</sup> Lihat Went, *Globalization Neoliberal*, 45.

<sup>74</sup> Penjelasan yang lebih detail soal ini, lihat Ray Bush, *Poverty and Neoliberalism Persistence and Reproduction in the Global South*, (London: Pluto Press, 2007).

<sup>75</sup> Lihat Andreas Bieler, Ingemar Lindberg and Devan Pillay (edited), *Labor and the Challenges of Globalization*. (London: Pluto Press, 2008); Untuk pekerjaan yang lebih berisiko seperti tukang bersih-bersih gedung yang keadaannya pun semakin memburuk, lihat Luis L M Aguiar and Andrew Herod (edited), *The Dirty Work of Neoliberalism Cleaners in the Global Economy*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2006).

<sup>76</sup> Lihat Loïc Wacquant, *Punishing the Poor The Neoliberal Government of Social Insecurity*, (Durham: Duke University Press, 2009); untuk kasus khusus seperti Florida, lihat Joe

yakinan bahwa neoliberalisme merupakan senjata paling ampuh dalam memerangi kolusi, korupsi, nepotisme yang difasilitasi oleh negara ternyata hanyalah ilusi.<sup>77</sup> Daftar janji-janji palsu ini masih bisa kita perpanjang.

## Penutup

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa neoliberalisme adalah konsekuensi internal dari perkembangan kapitalisme yang mengalami krisis struktural pasca-Perang Dunia II. Dari perspektif kelas, neoliberalisme adalah sebuah proyek politik dari kelas kapitalis, lebih khusus lagi lapis atas kelas kapitalis yang disebut “Kapital Keuangan” untuk merestorasi keuntungan mereka yang jatuh akibat krisis.

---

Soss, Richard C. Fording, and Sanford F. Schram, *Disciplining the Poor Neoliberal Paternalism and the Persistent Power of Race*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2011).

<sup>77</sup> Lihat Richard Robison and Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia The politics of oligarchy in an age of markets*, (London: RoutledgeCurzon, 2004).

Dalam konteks Indonesia, kita akan lebih bisa memahami esensi penerapan kebijakan neoliberal, jika kita melakukan analisa terlebih dahulu mengenai struktur kapitalisme yang sedang bekerja di Indonesia. Seperti apa komposisi dan konfigurasi kekuasaan kelas yang ada, kondisi objektif perjuangan kelas buruh dan kelas-kelas tertindas lainnya, serta bagaimana peran negara di perjuangan kelas itu. Analisa spesifik ini penting karena perkembangan kapitalisme selalu ditandai oleh perkembangan yang tidak seimbang, baik di level global, nasional, bahkan lokal. Artinya, tidak ada analisa umum tentang kapitalisme yang bisa diterapkan pada kondisi-kondisi khusus perkembangan kapitalisme.

Dengan demikian, adalah sebuah kekeliruan yang fatal jika kita melihat neoliberalisme hanya dari produk-produk kebijakan yang dihasilkan, seperti liberalisasi perdagangan dan keuangan, stabilisasi fiskal dan moneter, deregulasi, dan privatisasi. Respons dan resistensi terhadap

serangkaian kebijakan tersebut hanya akan menyebabkan perjuangan kelas pekerja terjatuh pada jebakan nasionalisme sempit dan kolaborasi kelas dengan kapitalis-kapitalis domestik. \*\*\*

*\*Bab ini sebelumnya telah terbit sebagai artikel dengan judul yang sama di IndoProgress Jurnal Pemikiran Marxis, Vol. I, Nomor 1, 2004, h. 1-32.*

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Aguiar, L M. L., and Herod, A. (edited).  
2006. *The Dirty Work of Neoliberalism Cleaners in the Global Economy*. Malden, MA, Oxford, UK, and Victoria, Australia: Blackwell Publishing.
- Rizky, A. dan Majidi, N. 2008. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, Publishing

Company.

- Brenner, A., Day, B., and Ness, I. (editors).  
2009. *The Encyclopedia of Strikes In American History*. New York: M.E. Sharpe.
- Bieler, A., Lindberg, I., and Pillay, D. (edited).  
2008. *Labor and the Challenges of Globalization*. London and Ann Arbor, MI: Pluto Press.
- Bush, R. 2007. *Poverty and Neoliberalism Persistence and Reproduction in the Global South*. London and Ann Arbor, MI: Pluto Press.
- Cherry, R., et.al. (edited). 1987. *The Imperilled Economy Book I Macroeconomics From the Left Perspective*. New York: The Union for Radical Political Economics.
- Clarke, S. 1993. *Marx's Theory of Crisis*. New York: Palgrave Macmillan.

Duménil, G., and Lévy, D. 2004. *Capital Resurgent Roots of the Neoliberal Revolution*. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.

Duménil, G., and Lévy, D. 2011. *The Crisis of Neoliberalism*. Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.

Eatwell, J., Milgate, M., Newman, P. (edited). 1990. *Marxian Economics*. New York and London: W.W. Norton & Company.

Foley, D. K. 1986. *Understanding Capital Marx's Economic Theory* Cambridge, Massachusetts and London, England: Harvard University Press.

Freeman, J.B. 2000. *Working Class New York Life and Labor Since World War II*. New York: The New Press.

Hackworth, J. 2007. *The Neoliberal City Governance, Ideology, and Development in American Urbanism*. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Howard, M.C., and King, J.E. 1985. *The Political Economy of Marx*. New York: New York University Press.

Howard, M.C., and King, J.E. 2008. *The Rise of Neoliberalism in Advanced Capitalist Economies A Materialist Analysis*. New York: Palgrave Macmillan.

Kiely, R. 2007. *The New Political Economy of Development Globalization Imperialisme Hegemony*. New York: Palgrave Macmillan.

Marx, K. 1998. *The 18th Brumaire of Louis Bonaparte*. New York: International Publishers.



- Marx, K. 1990. *Capital Vol. I*. London and New York: Penguin Books.
- Marx, K. 1981. *Capital: Volume III*. London and New York: Penguin Books..
- Marx, K. 1993. *Grundrisse*. London and New York: Penguin Books.
- Marx, K. 1988. *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and the Communist Manifesto*. Amhers, New York: Promotheus Books.
- Moody, K. 2007. *From Welfare State To Real Estate Regime Change in New York City, 1974 to the Present*. New York: The New Press.
- Mermelstein, D. (edited). 1975. *The Economic Crisis Reader Understanding Depression, Inflation, Unemployment, Energy, Food, Wage-Prices Controls, and Other Disorders*

- of American and World Capitalism*. New York: Vintage Books.
- Overbeek, H. (edited). 1993. *Restructuring Hegemony In The Global Political Economy the rise of transnational neo-liberalism in the 1980s*. London and New York: Routledge.
- Panitch, L., and Gindin, S. 2012. *The Making of Global Capitalism*. London: Verso.
- Panitch, L., Albo, G., and Chibber, V. (edited). 2011. *The Crisis This Time*. London, New York, and Halifax: Socialist Register.
- Robinson, W. I. 2008. *Latin America and Global Capitalism A Critical Globalization Perspective*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Robison, R., and Hadiz, V.R. 2004. *Reorganising Power in Indonesia The*

*politics of oligarchy in an age of markets*,  
London and New York: RoutledgeCurzon.

Saad-Filho, A. (edited). 2003. *Anti-Capitalism  
A Marxist Introduction*. London and Ann  
Arbor, MI: Pluto Press.

Saad-Filho, A., and Johnston, D. (edited).  
(2005). *Neoliberalism A Critical Reader*.  
London and Ann Arbor, MI: Pluto Press.

Shapiro, S. 2008. *How to Read Marx's Capital*.  
London and Ann Arbor, MI: Pluto Press.

Sherman, H.J. 2010. *The Roller Coaster  
Economy Financial Crisis, Great Recession,  
and the Public Option*. New York: M.E  
Sharpe.

Soss, J., Fording, R.C., and Schram, S.F.  
2011. *Disciplining the Poor Neoliberal  
Paternalism and the Persistent Power of  
Race*. Chicago: The University of Chicago

Press.

Schumpeter, J.A. 2008. *Capitalism, Socialism  
and Democracy*. New York: Harper  
Perennial Modern Thought.

Tabb, W. K. 1982. *The Long Default New York  
City and the Urban Fiscal Crisis*. New York:  
Monthly Review Press .

Tucker, R. C. (edited). 1978. *The Marx Engels  
Reader*. New York, London: W.W. Norton.

Wacquant, L. 2009. *Punishing the Poor  
The Neoliberal Government of Social  
Insecurity*. Durham and London: Duke  
University Press.

Went, R. 2000. *Globalization Neoliberal  
Challenge, Radical Response*. London and  
Ann Arbor, MI: Pluto Press, London, 2000.

### Internet:

"Ahmad Syafii Maarif: Dibutuhkan Pemimpin Baru Yang Bernyali," *SindoWeekly*, 23-29 Mei 2013, <http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/12/i/24-30-mei-2012/qanda/10/dibutuhkan-pemimpin-baru-yang-bernyali>. Diunduh pada 22 Oktober 2013.

"Amin Rais Ragukan Nasionalisme Jokowi," *Tempo.co*, 12/9/2013, <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/12/078512636/Amien-Rais-Ragukan-Nasionalisme-Jokowi>. Diunduh pada 22 Oktober 2013.

Ani. 2009. "Rizal: Kwik Sakit Kepala." *Kompas*, 26 Mei 2009, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/05/26/20005370/Rizal.Kwik.Sakit.Kepala>. Diunduh 22 Oktober 2009.

"DTI: Rapat DPR Diharapkan Hasilkan Keputusan Yang Jelas," *AntaraNews*, 2/3/2010,

<http://www.antaranews.com/berita/176024/dti-rapat-dpr-diharapkan-hasilkan-keputusan-yang-jelas>, diunduh pada 10/22/2013. Yang menarik, dari kalangan pengusaha pun wacana neoliberalisme di masa pemerintahan SBY-Budiono ini turut diperbincangkan secara kritis. Diunduh pada 22 Oktober 2013.

Fletcher, B. 2003. "Can U.S. Workers Embrace Anti-Imperialism?" *Monthly Review An Independent Socialist Magazine*, Vol. 55, Issue 03 (July-August), <http://monthlyreview.org/2003/07/01/can-u-s-workers-embrace-anti-imperialism>. Diunduh pada 21 September 2013.

Pontoh, C.H. 2006. "Jalan Amerika Latin Tambahan Untuk Budiman Sudjatmiko," *IndoPROGRESS*, 25 Desember 2006, <http://indoprogress.com/jalan-amerika-latin/>. Diunduh pada 12 November 2013.

Prasetyo, J.A. 2009. "The crisis of neoliberalism: Rhetoric and reality," *The Jakarta Post*, June 18, 2009, <http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/18/the-crisis-neoliberalism-rhetoric-and-reality.html>. Diunduh pada 22 Oktober 2013.

Ridha, Muhammad. 2013. "Arianto Sangaji: Pilihannya Sederhana, Sosialisme atau Barbarisme." *Left Book Review*. Diunduh pada 18 September 2013. <http://indoprogress.com/lbr/?p=1478>.

Scipes, K. 2005. "Labor Imperialism Redux?: AFL-CIO's Foreign Policy Since 1995," *Monthly Review An Independent Socialist Magazine*, Vol. 57, Issue 01 (May), <http://monthlyreview.org/2005/05/01/labor-imperialism-redux-the-afl-cios-foreign-policy-since-1995>. Diunduh pada 5 Oktober 2013.

Wahyu, D. 2009. "Chatib Basri: Kwik Tak Bisa Bedakan Neoliberal dan Neozep," *Detikfinance*, 26/05/2009. <http://finance.detik.com/read/2009/05/26/111801/1137212/4/chatib-basri-kwik-tak-bisa-bedakan-neoliberal-dan-neozep>. Diunduh pada 22 Oktober, 2009.

Wolff, Rick. "Capitalism Hits the Fan," <http://rdwolff.com/sites/default/files/attachment/4/03Wolff.pdf>. Tanpa tahun. Diunduh pada 21 September 2013.

[http://www.glovesoff.org/features/gjamerica\\_1.html](http://www.glovesoff.org/features/gjamerica_1.html), diunduh pada 19 September 2013.

### **Journal:**

Radice, H. 2008. "The Developmental State under Global Neoliberalism." *Third World Quarterly*, Vol. 29, No. 6. 1153 – 1174. London and New York: Routledge.

## Bab II: Neoliberalisme Pengalaman Indonesia

Arianto Sangadji

### Pengantar

NEOLIBERALISME, yang sering dipertukarkan dengan fundamentalisme pasar (*market fundamentalism*)<sup>1</sup> menjadi kata yang populer saat ini. Menjelaskannya tidak mudah, tetapi kalau ada kata lain yang bisa dipakai untuk menggantikannya, agar mudah dipahami secepat kilat,

maka pilihannya mungkin jatuh pada kata ‘kemerdekaan’ atau ‘kebebasan’ (*freedom*). Ada alasannya, karena Milton Friedman, penerima nobel tahun 1976 dan penulis buku ‘*Capitalism and Freedom*,’<sup>2</sup> yang dianggap salah seorang penggagas ide-ide neoliberalisme, menjadikan *freedom* sebagai hal paling pokok dalam gagasan-gagasannya. Di buku tersebut, dia menandakan bahwa kemerdekaan ekonomi adalah keharusan menuju kemerdekaan politik.

Tetapi *freedom* adalah kata yang mengundang banyak tafsir, tergantung siapa yang menafsirkan. Seperti kata Matthew Arnold ‘*freedom is a very good horse to ride, but to ride somewhere*’<sup>3</sup>. Ketika di tahun 2005, sekelompok kelas menengah terpelajar di Jakarta, misalnya, memanfaatkan ruang terbuka reformasi,

---

<sup>1</sup> J. E. Stiglitz, “Globalism’s discontents”. In D.B. Grusky & S. Szelenyi (eds.) *The Inequality Reader: contemporary and foundational readings in race, class, and gender*, (Boulder, Colorado: Westview Press, 2006).

---

<sup>2</sup> M. Friedman, *Capitalism and Freedom*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1962).

<sup>3</sup> D. Harvey, *A Brief History of Neoliberalism*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 6.

dengan bebas memasang iklan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sebuah program di bawah payung neoliberalisme, itu adalah *freedom*. Bukan karena beberapa orang di antara mereka adalah pengurus ‘Freedom Institute,’ tetapi itulah contoh sederhana apa itu kemerdekaan berpendapat, tergantung ‘siapa’ yang melakukannya.

Sebaliknya, seperti dilaporkan Pos Kota (10/5/2008), dengan cara berbeda, Jamaksari, seorang buruh tani dengan kerja serabutan, warga Kampung Kemanisan RT 03/02, Desa Kebuyutan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten, secara ‘bebas’ pula memilih gantung diri dengan tali plastik, yang diikat di dahan pohon petai, di kebun milik warga setempat. Sehari sebelumnya, dia berkeluh kesah kepada para tetangga bahwa ia sangat terpukul dengan rencana pemerintah menaikkan

harga BBM<sup>4</sup>. Kasus Jamaksari kemungkinan hanya puncak gunung es dari maraknya kasus-kasus bunuh diri yang terjadi menyusul kebijakan-kebijakan neoliberal. VHR Media.com<sup>5</sup> (2007) melaporkan, antara 2005 dan 2007 terdapat sekitar 50,000 orang Indonesia bunuh diri karena kemiskinan dan himpitan ekonomi. Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, A Prayitno, dalam laporan tersebut menyebut kemiskinan yang terus bertambah, mahal biaya sekolah dan kesehatan, serta penggusuran sebagai faktor penyebab. Di sini, *freedom* juga muncul dalam wajah lain, yakni tidak bebas dari rasa lapar.

---

<sup>4</sup> S. Arismunandar (2008): “Memilih Bunuh Diri Karena Kenaikan Harga BBM”, [online]. Dapat diakses melalui: <http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=8238>. [akses pada 5-6-2009].

<sup>5</sup> VHR Media.com (2007), “Penyebab Utama Kemiskinan: 50.000 Orang Indonesia Bunuh Diri Selama 3 Tahun Terakhir”, 16 November.

Sengaja cerita seperti ini perlu dihadirkan untuk membawa percakapan tentang neoliberalisme agar tidak mengawang-awang alias abstrak, tetapi turun ke bumi dengan contoh-contoh lapangan yang konkret. Tulisan ini lebih memusatkan perhatian pada pokok-pokok pikiran neoliberalisme dan kritik-kritik terhadapnya, gambaran ringkas tentang sejarah kelahiran paham ini sampai masuk ke dalam kekuasaan dan pengalaman praktiknya di Indonesia.

## Pengertian

Apa sebenarnya neoliberalisme?

Pertama, dalam bukunya *'A Brief History of Neoliberalism'*,<sup>6</sup> David Harvey mengatakan neoliberalisme adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem

---

<sup>6</sup> Op.cit

kepemilikan pribadi. Ini merupakan kombinasi antara liberalisme, paham yang menekankan kemerdekaan dan kebebasan individu, dan doktrin pasar bebas dalam tradisi ekonomi neoklasik. Para pendukungnya menempatkan idealisme politik tentang martabat manusia dan kemerdekaan individu, sebagai 'nilai sentral peradaban.' Mereka menganggap, nilai-nilai itu menghadapi ancaman bukan saja oleh fasisme, komunisme, dan kediktatoran, tetapi oleh segala bentuk campur tangan negara yang memakai idealisme kolektif untuk menekan kebebasan individu.

Rumusan dasar ini terlihat dalam tulisan-tulisan Friedrich A. Hayek, intelektual terdepan yang membela paham ini. Intinya, Hayek<sup>7</sup> menolak segala bentuk intervensi negara karena dianggap membahayakan pasar dan kebebasan politik. Baginya, kebebasan adalah

---

<sup>7</sup> F.A. Hayek, *the Road to Serfdom*, (Chicago: University of Chicago Press, 1944).

tidak adanya *coercion*, dan kebebasan paling utama adalah kebebasan ekonomi, yang berarti kebebasan berusaha tanpa kontrol negara. John Gray<sup>8</sup> menyatakan, karya-karya Hayek bertumpu pada liberalisme klasik, yang menjunjung hak-hak individu dan keutamaan moral dari kebebasan individu, keunggulan pasar bebas dan keharusan pemerintah yang terbatas di bawah supremasi hukum.

Rekan Hayek, ekonom Milton Friedman, memiliki pandangan sama di mana ia menghormati liberalisme abad 19 yang menekankan kebebasan individu dan mendukung *laissez faire* sebagai cara untuk mengurangi peran negara. Sebaliknya, Friedman menganggap liberalisme abad 20 seperti yang berkembang di Amerika Serikat (AS), terutama setelah 1930, adalah liberalisme yang terdistorsi oleh intervensi negara. Menurutnya ancaman utama kebebasan

adalah pemusatan kekuasaan, karena itu ruang lingkup kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tugas pokok pemerintah adalah melindungi kebebasan melalui penegakan hukum dan ketertiban, memperkuat kontrak-kontrak swasta, dan melindungi pasar yang kompetitif. Di sini perlu digarisbawahi, perhatian utama Friedman adalah kebebasan dalam konteks '*competitive capitalism*/kapitalisme kompetitif' (berfungsinya korporasi-korporasi swasta dalam sistem berbasiskan pasar bebas), yakni sebuah sistem kebebasan ekonomi, untuk kemudian menuju kebebasan politik.

Kedua, seperti sudah dipercakapkan luas, paham ini secara praktis tertuang dalam doktrin 'Washington Consensus,' sebuah agenda teknokratis berisi daftar kebijakan ekonomi, yang pertama kalinya diperkenalkan oleh (eks) direktur Bank Dunia John Williamson untuk negara-negara Amerika Latin, yang menghadapi defisit dan

---

<sup>8</sup> J. Gray, *Hayek on Liberty*, (London: Routledge, 1998).



inflasi yang tinggi, pada tahun 1989<sup>9</sup>. Disebut Konsensus Washington, karena merupakan kesepakatan kebijakan antara World Bank, IMF, dan Kementerian Keuangan AS yang berpusat di Washington. Awalnya, ada 10 kata kunci dalam konsensus ini; (1) disiplin fiskal, dengan menjaga defisit serendah-rendahnya, karena defisit yang tinggi akan mengakibatkan inflasi dan pelarian modal; (2) prioritas-prioritas belanja pemerintah, dengan mengurangi atau menghilangkan subsidi dalam sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya; (3) reformasi perpajakan; (4) liberalisasi keuangan; (5) nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang harus mengadopsi nilai tukar yang kompetitif agar memacu ekspor; (6) liberalisasi perdagangan, dengan meminimumkan hambatan-hambatan tarif dan perizinan; (7) penanaman modal

---

<sup>9</sup> J. Williamson, *the Washington Consensus as Policy Prescription for Development*, A lecture in the series "Practitioners of Development" delivered at the World Bank on January 13, 2004.

asing harus dibuat seliberal mungkin karena dapat membawa masuk keuntungan modal dan keahlian dari luar negeri; (8) privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah; (9) deregulasi sektor ekonomi, karena pengaturan pemerintah yang kuat dan berlebihan dapat menciptakan korupsi dan diskriminasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki akses rendah kepada pejabat-pejabat pemerintah di level lebih tinggi; (10) penghargaan terhadap hak milik harus ditegakkan, karena hukum yang lemah dan sistem peradilan yang jelek dapat mengurangi insentif untuk akumulasi modal<sup>10</sup>.

Dalam perkembangannya, ada penambahan 10 kata kunci baru. (1) Bank Sentral yang independen; (2) reformasi baik terhadap sektor publik maupun tata kelola sektor swasta; (3) fleksibilitas tenaga kerja; (4) pemberlakuan

---

<sup>10</sup> Dikutip oleh M. Naim, "Washington Consensus or Washington Confusion?", *Foreign Policy*, SPRING 2000.

kesepakatan-kesepakatan WTO dan harmonisasi standar-standar nasional dengan standar-standar internasional di dalam kegiatan bisnis dan keuangan, tetapi dengan pengecualian (terutama tentang perburuhan dan lingkungan hidup); (5) penguatan sistem keuangan nasional untuk memfasilitasi liberalisasi; (6) pembangunan berkelanjutan; (7) perlindungan masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial; (8) strategi pengurangan kemiskinan; (9) adanya agenda kebijakan pembangunan nasional; (10) partisipasi demokrasi.<sup>11</sup>

Tampak jelas, neoliberalisme mengagung-agungkan pasar di atas segala-galanya. Karena, pasar dipandang memiliki cara, mekanisme, dan kesucian sendiri untuk mengurus dirinya secara spontan. Jauh-jauh hari,

---

<sup>11</sup> M. Beeson & I. Islam, "Neoliberalism and East Asia: Resisting the Washington Consensus". In K. Hewison & R. Robison (eds.) *East Asia and the Trials of Neo-Liberalism*, (London: Routledge, 2006).

sejarawan ekonomi Karl Polanyi<sup>12</sup>, menamakan pandangan ini untuk kemudian dikritiknya, yakni pasar yang memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri (*self-regulating market*), tanpa atau peranan negara sekecil-kecilnya (*minimal state*).

Pandangan radikal ini memperoleh kritik keras. Para pengkritik menganggap, penempatan pasar sebagai sesuatu yang terisolasi dari kekuasaan politik, kurang lebih hanya mimpi belaka. Polanyi dalam bukunya *The Great Transformation*, menyebutnya "*embeddedness*," di mana ekonomi bukan dunia yang otonom, tetapi secara historis tersubordinatkan ke dalam politik dan sosial. Dalam pengantar untuk buku ini, F. Block<sup>13</sup> menyatakan,

---

<sup>12</sup> K. Polanyi, *the Great Transformation: The political and economic origins of our time*, (Boston: Beacon Press, 2001).

<sup>13</sup> F. Block, "Introduction". In K. Polanyi, *Great Transformation: The political and economic origins of our time*, (Boston: Beacon Press., 2001), xxiv.

Polanyi menolak *self-regulating* yang mengharuskan masyarakat tunduk kepada logika pasar. Dia menentang fundamentalisme pasar, karena dianggapnya hanya ilusi. Apa yang disebut *self-regulating market*, dengan menendang negara keluar dari ekonomi, seperti dijanjikan penyanjung neoliberal, hanya utopia.

‘Liberal economy gave a false direction to our ideals. It seems to approximate the fulfillment of intrinsically utopian expectation. No society is possible in which power and compulsion are absent, nor a world in which force has no function. It was an illusion to assume a society shaped by man’s will and wish alone’.<sup>14</sup>

Dalam sejarahnya, di abad 19, Polanyi memberi contoh tentang industri katun di Inggris—industri perdagangan bebas paling maju—diciptakan oleh dukungan tarif yang protektif dan subsidi buruh secara tidak langsung. Artinya,

---

<sup>14</sup> Polanyi, op.cit., 266.

*laissez faire* pada dasarnya dilindungi negara. Dia bilang ‘*there was nothing natural about laissez faire..*’ Pasar tidak pernah tumbuh secara alamiah, tetapi melalui campur tangan pemerintah.

Di luar kritik Polanyi mengenai ilusi pasar yang dapat bekerja secara spontan, menurut Harvey<sup>15</sup> masalah paling mendasar dari penerapan neoliberalisme adalah pengalihan aset dan kekayaan dari massa rakyat ke tangan segelintir kelas di dalam masyarakat dan dari negeri-negeri terbelakang ke negeri-negeri kaya. Dan menurutnya, negara yang memonopoli kekerasan dan membuat aturan-aturan main, memainkan peranan penting dalam mendukung dan mempromosikan proses ini. Ia menyebut proses ini sebagai *accumulation by dispossession*, yang meliputi: ‘komodifikasi dan privatisasi tanah dan mengusir para petani secara paksa;

---

<sup>15</sup> Harvey, *A Brief History*

konversi berbagai bentuk hak milik (bersama, kolektif, negara, dan sebagainya) ke dalam hak-hak kepemilikan pribadi secara eksklusif; larangan secara paksa hak-hak milik bersama; komodifikasi tenaga kerja dan eliminasi secara paksa bentuk-bentuk alternatif (*indigenous*) model-model produksi dan konsumsi; proses-proses pengambilalihan aset dengan cara-cara kolonial, neo-kolonial, dan imperial (termasuk sumber daya alam); monetisasi nilai tukar, pajak, dan terutama tanah; perdagangan budak (yang masih berlangsung, terutama dalam industri seks) dan; peminjaman dengan bunga yang mencekik, utang nasional dan yang paling merusak adalah penggunaan sistem kredit yang merupakan cara-cara paling radikal dari akumulasi primitif<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Lihat David Harvey, *the New Imperialism*, (Oxford: Oxford University Press, 2003); dan juga David Harvey, "Neoliberalism and Creative Destruction", *ANNALS, AAPS*, 610, March, 2007, 34-5.

Dengan *accumulation by dispossession*, Harvey mencoba mengembangkan konsep Karl Marx tentang '*primitive accumulation*,' yakni asal-usul *surplus*, di mana akumulasi kapitalis berlangsung. Menurut Marx<sup>17</sup>, 'akumulasi primitif, di tingkat pertama dan paling pokok, adalah proses sejarah pemisahan produsen dari alat produksi.' Dengan kata lain, proses mengubah para produsen menjadi buruh upahan. Hal penting yang perlu digaris-bawahi dari Marx, yang menghabiskan delapan bab di bagian kedelapan dari buku *Capital I* ketika menguraikan tentang akumulasi primitif, adalah kekerasan. Mengutip Augier, yang mengatakan, jika uang hadir di dunia dengan lumuran darah bawaan di sebelah pipi, maka kapitalisme lahir, menurut Marx<sup>18</sup> 'dengan darah dan kotoran yang

---

<sup>17</sup> K. Marx, *Capital: A critique of political economy, Volume I*, (London: Pelican Books (reprinted in Penguin Classic, 1990), 874-5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 925-6.

muncrat dari pori-pori, mengalir dari kepala turun ke ujung kaki.’ Dalam sejarah, proses ini terjadi di mana-mana, seperti dia menulis:

‘the discovery of gold and silver in America, the extirpation, enslavement and entombment in mines of the indigenous population of that continent, the beginnings of the conquest and plunder of India, and the conversion of Africa into a preserve for the commercial hunting of black skins, are all things which characterize the dawn of the era of capitalist production. These idyllic proceedings are the chief moments of primitive accumulation’<sup>19</sup>.

Kekerasan memang terlembagakan di dalam sistem kapitalisme. Di sini, penting melihat hubungan antara militerisme dengan sistem ini. Menurut M. Mann<sup>20</sup> militerisme adalah ke-

---

<sup>19</sup> Ibid., 915.

<sup>20</sup> M. Mann, “Capitalism and militarism”, in M. Shaw (ed.) *War, State, and Society*, (London: McMillan Press, 1984), 25-46.

harusan untuk akumulasi modal swasta, karena tanpa itu, produksi, arus komoditi, dan kepemilikan pribadi atas alat produksi akan terganggu.

### Jalan Menuju Kekuasaan

Menurut Harvey,<sup>21</sup> neoliberalisme adalah sebuah proyek politik, sebagai obat penawar terhadap ancaman yang dihadapi oleh tatanan sosial kapitalisme dan penyakit yang dideritanya. Sebagai proyek, menurutnya, hal ini bisa ditelusuri dari sebuah kelompok kecil yang eksklusif – terkenal dengan nama “*the Mont Pelerin Society*” – terdiri dari filsuf politik Austria Frederich von Hayek, ekonom Amerika Serikat (AS) Milton Friedman, filsuf Karl Popper, dan lain-lain, yang menyebut diri mereka sebagai ‘liberal’ (dalam tradisi Eropa) karena keyakinan tentang idealisme kebebasan pribadi. Ketika membentuk kelompok ini di tahun 1947, mereka memprihatinkan bahaya yang mengancam

---

<sup>21</sup> Harvey, *A Brief History*

jantung peradaban ‘*the Western Man*’ (kebebasan berfikir dan berekspresi), sehingga diperlukan sebuah ‘perang ide’ yang harus dimenangkan. Label neoliberal menunjukkan kepercayaan kuat mereka terhadap prinsip-prinsip pasar bebas dari ekonomi neo-klasik yang tumbuh di abad 19 (berkat karya-karya Alfred Marshall, William Stanley Jevons, dan Leon Walras) untuk menggantikan karya-karya klasik dari Adam Smith, David Ricardo, dan Karl Marx. Meskipun mereka juga respek dengan teori Adam Smith tentang ‘*invisible hand*/tangan tak terlihat.’ Doktrin neoliberalisme, oleh karena itu, adalah sebuah perlawanan terhadap teori-teori tentang intervensi negara, seperti yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes ketika menghadapi depresi besar tahun 1930-an, dan teori-teori tentang sentralisasi perencanaan ekonomi di dalam tradisi Marxis<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Harvey, Ibid.; D. Yergin & J. Stanislaw, *the Commanding Heights: the battle between government and the marketplace that*

Dalam perkembangannya, *the Mont Pelerin Society* memperoleh dukungan keuangan dan politik yang sangat kuat. Di AS, secara khusus, mereka memperoleh dukungan dari kelompok individu kaya dan para pemimpin perusahaan yang menentang segala bentuk intervensi pemerintah. Mereka menggalang perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai ekonomi campuran (*mixed economy*). Kepercayaan ini semakin menguat sampai krisis ekonomi 1970an, ketika paham ini masuk ke dalam *mainstream* kekuasaan dan lembaga-lembaga pemikiran, menggeser dominasi Keynesianisme. Terutama di AS dan Inggris, lembaga-lembaga pemikiran dengan dukungan keuangan kuat, seperti Institute of Economic Affairs (London), Heritage Foundation (Washington), dan di Universitas Chicago yang sangat dipengaruhi oleh Milton Friedman, semakin besar pengaruhnya.

---

*is remarking the modern world*, (New York: Simon & Schuster, 1998).

Penghargaan nobel ekonomi yang diberikan kepada Hayek (1974) dan Friedman (1976) semakin membuat paham ini kian berkibar. Teori neoliberal mulai masuk ke dalam kebijakan di era 1970an itu, terutama di sektor moneter, khususnya di masa pemerintahan Jimmy Carter, saat deregulasi ekonomi diperlukan sebagai salah satu jawaban terhadap stagflasi.<sup>23</sup>

Sejak 1979, konsolidasi neoliberalisme mencapai puncaknya. Terpilihnya Margaret Thatcher (1979) sebagai perdana menteri di Inggris dan Ronald Reagan (1980) sebagai presiden di AS, merupakan era di mana kebijakan ekonomi neoliberal datang mendominasi. Thatcher yang terpengaruh dengan Hayek<sup>24</sup> mengangkat Keith Joseph, pengikut Hayek, sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian

---

<sup>23</sup> Harvey, Op.cit

<sup>24</sup> A. Flew, "the Influence of the Discipline of Philosophy in Post-War Britain (dalam wawancara dengan A. Seldon)," *Contemporary British History*, 10 (2): 1996, 117 — 125.

menjadi Menteri Pendidikan; sementara Reagan menunjuk David Stockman, seorang penganut Hayek, untuk mengepalai OMB (the Office of Management and Budget), jabatan setingkat menteri. Thatcher dan Reagan menekankan doktrin kompetisi—kompetisi antar bangsa, wilayah, perusahaan, dan individu. Inilah era di mana terjadi deregulasi pasar keuangan, privatisasi, pelemahan kelembagaan-kelembagaan jaminan sosial, pelemahan serikat-serikat buruh dan perlindungan pasar tenaga kerja, penguangan peran pemerintah, dan membuka pintu untuk arus barang dan modal internasional.

Apa yang terlihat dari proses ini adalah peranan negara di dalam sejarah muncul dan menyebarnya neoliberalisme. Dengan kata lain, kekuasaan negaralah yang menjadi kata kunci untuk mengartikulasikan paham ini. Nah di sini, sangat penting merujuk ke Harvey<sup>25</sup> yang

---

<sup>25</sup> Harvey, *the New Imperialism*

mengupas tuntas apa yang dia sebut '*neoliberal state*' (negara neoliberal). Menurutny, negara neoliberal memiliki misi menciptakan '*good bussiness climate*' bagi akumulasi modal, tidak peduli dampak negatif sosial ekonominya. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kepentingan-kepentingan bisnis, seperti privatisasi sektor-sektor yang sebelumnya dikuasai negara, memacu pertumbuhan industri keuangan (*financialization*), dan sebaliknya, menarik diri dari tanggung jawab di bidang sosial. Negara menciptakan dan melindungi kerangka kerja secara kelembagaan yang menjamin hak milik pribadi, kebebasan individu, tidak membebani pasar, dan mendorong perdagangan bebas. Dan tidak kalah penting, negara juga mesti menyiapkan militer, polisi, dan lembaga-lembaga peradilan untuk menjamin semua itu bekerja.

Seperti sudah disampaikan, era Thatcher dan Reagan memang dianggap sebagai masa di mana paham neoliberal masuk ke dalam arus

utama kekuasaan. Tetapi di bawah era Perang Dingin (*Cold War*), musuh utama paham ini juga adalah negeri-negeri di bawah pengaruh sosialisme. Tidak heran, atas alasan itulah, Chile tampaknya menjadi laboratorium penerapan paham ini. Itu terjadi di tahun 1970an, ketika agenda-agenda neoliberal dipraktikkan, setelah sebuah kudeta berdarah militer Chile yang didukung oleh AS terhadap pemerintahan sosialis yang terpilih secara sah dan demokratik di bawah Salvador Allende<sup>26</sup>. Sekelompok ekonom muda Chile yang dikenal dengan sebutan '*the Chicago Boys*,' karena pengikut Milton Friedman, dari mana mereka pernah menyenam pendidikan di University of Chicago, masuk menjadi tulang punggung rezim Augusto Pinochet. Bekerja sama dengan IMF, dari tangan merekalah ide-ide neoliberal dipraktikkan melalui privatisasi aset-aset pemerintah, membuka

---

<sup>26</sup> R. J. Alexander, *the Tragedy of Chile*, (London: Greenwood Press, 1978).



investasi swasta berbasis sumber daya alam (perikanan dan kehutanan), memfasilitasi investasi-investasi asing dan membuka perdagangan bebas<sup>27</sup>. Chile merupakan gambar yang jelas, di mana kebebasan ekonomi (*economic freedom*) hidup berdampingan dengan teror politik. Friedman, yang menjadi arsitek ekonomi dan penasihat tidak resmi 'the Chicago Boys' menyatakan, di luar ketidak-setujuannya terhadap sistem politik otoriter di negeri itu, dia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang buruk untuk memberikan nasihat kepada pemerintahan Pinochet<sup>28</sup>.

Dari lensa lain, Global War on Terror (GWOT), di bawah hegemoni AS, datang mengisi tempat yang kosong setelah berakhirnya

---

<sup>27</sup> J. Petras & F.I. Leiva, *Democracy and Poverty in Chile: The limits to electoral politics*, (Oxford: Westview Press, 1994). Lihat juga Harvey, *A Brief History*

<sup>28</sup> O. Letelier, "Economic Freedom's Awful Toll: The 'Chicago Boys' in Chile", *Review of Radical Political Economics*, 8(3), 1976:44-52.

masa Perang Dingin. Atas dalih promosi institusi dan nilai-nilai politik liberal di luar negeri yang menjadi agenda sentral pemerintah Bush, baik dalam perang melawan terorisme maupun Grand Strategy-nya<sup>29</sup>, AS melakukan penyerbuan ke Iraq untuk menghancurkan rezim Saddam Hussein. Tak bisa disangkal, invasi Iraq merupakan contoh paling telanjang apa yang disebut dengan rezim '*neoliberal militarism*' beroperasi, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar untuk melayani korporasi-korporasi swasta dalam mengakumulasi profit, bukan untuk menekan angka pengangguran, perbaikan upah, dan jaminan kenyamanan ekonomi bagi kaum buruh, seperti yang menjadi pertimbangan utama penganut '*military keynesianism*'<sup>30</sup>. J.E.

---

<sup>29</sup> J. Ikenberry, "American Grand Strategy in the Age of Terror", *Survival*, 43(4), 2001-2002:19-34.

<sup>30</sup> J. M. Cypher, "From Military Keynesianism to Global-Neoliberal Militarism", *Monthly Review*, 59 (2), 2007: 37-55.

Stiglitz & L. J. Bilmes<sup>31</sup> mencatat, dalam invasi Iraq, AS mengontrak 100.000 kontraktor swasta, mulai dari melayani masak-memasak, pelayanan sistem persenjataan, sampai perlindungan diplomat. Bahkan memberikan kontrak kepada perusahaan-perusahaan keamanan swasta (*private security companies*), yang pada tahun 2007 saja menghabiskan USD 4 miliar. Keterlibatan perusahaan-perusahaan keamanan swasta sekaligus juga menunjukkan bahwa angkatan bersenjata secara parsial tengah diprivatisasi. Sebagai tambahan, privatisasi sektor keamanan seperti ini ditandai dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan militer swasta (*privat military firms* [PMFs]) dan perusahaan-perusahaan keamanan swasta (*private security firms* [PSCs]) sejak berakhirnya Perang Dingin<sup>32</sup> kian menggambarkan

---

<sup>31</sup> J. E. Stiglitz & L. Bilmes, *the Three Trillion Dollar War: the True Cost of the Iraq*, (NY: W.W. Norton & Company, 2008).

<sup>32</sup> P. W. Singer, *Corporate Warrior: the Rise of the Privatized Military Industry*, (Ithaca: Cornell University Press, 2003).

bahwa neoliberalisasi telah berlangsung sangat radikal, termasuk menggantikan fungsi-fungsi jaminan keamanan yang secara tradisional di-monopoli negara.

Setelah berhasil menghancurkan rezim Saddam, kepala Otoritas Sementara Pasukan Koalisi (Coalition Provisional Authority [CPA]), Paul Bremer mulai memaksakan kebijakan-kebijakan neoliberal. Hanya dalam 14 bulan, CPA telah membangun pilar-pilar ekonomi neoliberal melalui serangkaian peraturan: larangan terhadap kegiatan produksi oleh negara dan larangan subsidi komoditi; pengurangan hambatan-hambatan tarif impor dan perdagangan; deregulasi proteksi sistem pengupahan dan membuka pasar tenaga kerja; reformasi perpajakan; reformasi keuangan dan reformasi sektor perbankan; menetapkan aturan-aturan perdagangan internasional berdasarkan ketentuan-ketentuan WTO; dan, privatisasi perusahaan-perusahaan

negara<sup>33</sup>. Semua alasan itu jelas-jelas merupakan doktrin neoliberal, tetapi sering kali dipoles dengan argumentasi yang mudah diterima ‘akal sehat.’ Misalnya, ketika privatisasi perusahaan-perusahaan negara, maka justifikasi politik yang dipakai adalah bahwa selama pemerintahan Saddam, perusahaan-perusahaan itu menjadi sarang korupsi. Memang tesis penganut neoliberal dalam perlawanan terhadap korupsi di sektor pemerintah didasarkan pada klaim bahwa privatisasi dan kompetisi dapat menghilangkan korupsi dalam kegiatan ekonomi yang didominasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah<sup>34</sup>.

## Pengalaman Indonesia

Studi-studi Vedi R. Hadiz dan Richard

---

<sup>33</sup> D. Whyte (2007) “the Crimes of Neo-liberal Rule in Occupied Iraq”, *BRIT. J. CRIMINOL.* 47 (2), 2007:177-195.

<sup>34</sup> Ibid

Robison<sup>35</sup> dan A. Rosser<sup>36</sup> memberi indikasi bahwa paham neoliberal telah masuk dalam kebijakan sejak rezim Orde Baru, hingga rezim-rezim yang terbentuk sesudahnya. Apa yang harus digarisbawahi, kebijakan-kebijakan neoliberal memang tidak turun secara serempak, tetapi melalui proses evolusi yang panjang, yang bisa ditelusuri dari berbagai kebijakan reformasi ekonomi sejak kelahiran Orde Baru. Apa yang disebut sebagai deregulasi dan birokratisasi sejak era 1980-an, menyusul kejatuhan harga minyak adalah bukti reformasi pasar itu, dan kebijakan itu berlangsung kian mendaam setelah krisis ekonomi dan politik 1997-8. Kebijakan-kebijakan itu di antaranya adalah reformasi pasar modal, keuangan dan perbankan,

---

<sup>35</sup> V.R. Hadiz & R. Robison, “Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidation: the Indonesia paradox”. In K. Hewison & R. Robison (eds.) *East-Asia and the Trials of Neoliberalism*, (London: Routledge, 2006), 24-45.

<sup>36</sup> A. Rosser, *the Politics of Economic Liberalisation in Indonesia: State, market, and power*, (Richmond: Curzon Press, 2002).

perdagangan dan investasi, dan hak milik intelektual.

Seperi pengalaman Chile, Indonesia memulainya dengan kekerasan paling barbarik dalam sejarah kemanusiaan di abad lalu, ketika ratusan ribu orang diburu dan dibunuh, dengan tuduhan sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan sebagian dikirim ke kamp-kamp isolasi Pulau Buru tanpa proses pengadilan<sup>37</sup>. Dan pembunuhan itu jelas-jelas di bawah dukungan kuat AS. Peristiwa ini sendiri tidak boleh dibaca sebagai peristiwa politik yang berdiri sendiri, tetapi jelas berhubungan dengan bagaimana sebuah masyarakat akan diorganisasikan menurut kaidah-kaidah ekonomi kapitalis pada masa-masa berikutnya. Apa yang terjadi adalah lahirnya sebuah

---

<sup>37</sup> Lihat J. Roosa, *Pretext for Mass Murder: The September 30th movement & Suharto's coup d'état in Indonesia*, (Wisconsin: University of Wisconsin, 2006); dan R. Cribb, 'Unresolved problems of Indonesian Killings in 1965-1966', *Asian Survey*, 42 (4), 2002: 550-563.

rezim kapitalis, di mana ide-ide neoliberal—disuarakan kelompok teknokrat yang lazim disebut Mafia Berkeley<sup>38</sup>—secara perlahan mulai dipraktikkan, misalnya, dengan membuka pintu secara lebar bagi investasi swasta asing. Hilmar Farid<sup>39</sup> menunjuk perkembangan ini sebagai bagian dari '*primitive accumulation*,' proses penumpukan kekayaan yang bertumpu pada hak milik pribadi, yang didahului atau dilakukan dengan kekerasan yang berdarah-darah.

Kita sudah lihat bersama, segera setelah kekerasan brutal 1965, IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting, bersama-sama dengan negara-negara Barat, mendorong pemerintah Orde Baru menerapkan ekonomi kapitalis. Juni 1968, Presiden Bank Dunia Robert McNamara,

---

<sup>38</sup> D. Ransomm, "Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre," *Ramparts*, October, 1970: 27-29.

<sup>39</sup> H. Farid, "Indonesia's original sin: mass killings and capitalist expansion, 1965-66", *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 6, Number 1, 2005: 3-16.

mengunjungi Jakarta dan kemudian menempatkan stafnya di Jakarta dalam jumlah besar setelah kantornya di Washington<sup>40</sup>. Rezim baru secepat kilat memperkenalkan kebijakan pro-investasi asing, yang dimusuhi di masa sebelumnya. Di antaranya, untuk menghilangkan trauma nasionalisasi, maka pemerintah mengeluarkan UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang menjamin tidak terjadi nasionalisasi atau pencabutan hak. Pemerintah juga merangsang investasi asing dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak (*tax holiday*).

Yang hendak diungkapkan dalam bagian berikut ini adalah melihat bekerjanya paham neoliberal, dengan mengambil contoh pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam, khususnya pertambangan dan perkebunan.

---

<sup>40</sup> B. May, *the Indonesian Tragedy*, (London: R. & K. Paul, 1978).

## Neoliberalisasi Awal

Industri pertambangan menjadi contoh paling tepat bagaimana ide-ide neoliberal mulai diperkenalkan sejak awal Orde Baru. UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi titik masuk investasi asing di sektor ini. Pasal 8 UU No. 1/1967 menyebutkan “Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku”.

Kebijakan lebih rinci yang mendorong investasi di sektor ini adalah UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Indonesia memperkenalkan Kontrak Karya (KK), model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal dalam dunia industri pertambangan. Kebijakan-kebijakan ini benar-benar merupakan cermin

dari apa yang oleh J. Emel & M.T. Huber<sup>41</sup> sebut sebagai mantra ‘neoliberal risk’ di sektor pertambangan. Mantra ini menganggap perusahaan swasta menghadapi risiko politik, komersial, dan geologi yang besar dan tidak sepadan dengan pemilik tanah dan mineral (negara) di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memperoleh jaminan pemerintah bahwa tidak ada nasionalisasi dan aneka klaim hak milik (*multiple property claims*), ancaman terorisme dan sabotase, pembatalan kontrak, dan aturan perpajakan, serta eksplorasi dan eksploitasi yang kaku. Tujuannya adalah agar akumulasi kapital dapat berlangsung tanpa gangguan.

Freeport yang pertama kali memperoleh KK April 1967, benar-benar mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah. Draft KK itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi

---

<sup>41</sup> J. Emel & M.T. Huber, “a Risky Business: Mining, rent and the neoliberalization of ‘risk’”, *Geoforum* (39), 2008: 1394.

sepenuhnya disiapkan sendiri oleh Freeport untuk kemudian disetujui. Moh. Sadli, salah seorang teknokrat yang diasosiasikan dengan ‘Mafia Berkeley’ mengatakan, KK Freeport saat itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menarik investasi asing. Fakta lain, pemberian kontrak itu terjadi ketika status politik Papua masih belum jelas: apakah memilih bergabung dengan Indonesia atau mau merdeka melalui sebuah referendum, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang akan dilakukan pada tahun 1969. Dan seperti kita ketahui, ternyata referendum dilakukan bukan berdasarkan prinsip ‘satu orang satu suara,’ sesuai ketentuan PBB, tetapi dilakukan oleh hanya 1.024 orang, yang berada di bawah pengawasan tentara. Pemerintah menganggap kendala fisik dan penduduk Papua yang primitif menjadi faktor penghalang untuk sebuah referendum yang melibatkan hampir 1 juta penduduk Papua saat itu. Tidak heran, di bawah akal-akalan pemerintah

ini, hasil referendum menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia<sup>42</sup>.

Di bawah perlakuan yang istimewa terhadap Freeport (subsidiary of Freeport Sulphur Co, AS), investasi swasta asing berlomba-lomba masuk Indonesia. Setelah Freeport Indonesia memperoleh kontrak karya (KK) tahun 1967, maka hingga 1970 tercatat 9 perusahaan asing mengantongi KK dengan pemerintah Indonesia, dua di antaranya PT. Freeport dan PT. Inco. Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing, dan sebelum kejatuhan Suharto, dianggap sebagai negeri yang paling menarik dari sisi investasi pertambangan di Asia<sup>43</sup>. Nilai investasi KK, 1968—1990, mencapai USD 2,339 juta; tahun 1994 USD 861 juta dan; tahun 1997, USD 1, 922 juta. Pemain-pemain utama dalam industri pertambangan dunia hadir

---

<sup>42</sup> D. Leith, *the Politic of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*, (Honolulu: University of Hawai, 2000).

<sup>43</sup> Ibid

di Indonesia, seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan Inco Ltd. Tentu saja, itu semua berkat keuntungan yang melimpah ruah di bawah jaminan politik yang kuat.

Tetapi, harga yang harus dibayar dari neoliberalisasi di bidang ini juga sangat mahal. Konflik dan kekerasan muncul di mana-mana, di mana fungsi negara neoliberal dalam proses ini menjadi sentral untuk menjamin proses pengerukan mineral. Itu yang terjadi di Papua bertahun-tahun. Sebuah contoh, tahun 1977, dilaporkan bahwa Freeport mengalami kerugian sekitar USD 11 juta karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan sabotase instalasi milik perusahaan itu. Menanggapi kasus ini, ABRI/TNI melancarkan operasi Tumpas di daerah pegunungan dengan menggunakan pesawat buatan AS Bronco dan helikopter-helikopter yang dilengkapi senjata dengan target

di darat. Studi Leith menunjukkan bahwa serangan dilakukan dengan melakukan pengeboman di wilayah yang luas, serangan udara dengan manuver terbang rendah, dan menjatuhkan bom napalm di sekitar desa-desa di daerah pegunungan. Sehingga, kalau di kemudian hari, Freeport meraup keuntungan yang melimpah ruah, di mana seorang bos Freeport, James R. Moffet, di tahun 1999–2000 saja, memperoleh pendapatan senilai USD 8 juta dalam bentuk gaji, bonus, dan berbagai pendapatan tahunan lainnya, maka tidak lain itu dialirkan melalui tumpahan darah.

Seperti juga di Freeport, di wilayah lainnya penduduk-penduduk setempat juga terpaksa kehilangan tanah atau akses ke sumber daya alam lainnya dan menerima dampak pencemaran lingkungan akibat kebijakan pertambangan yang sangat liberal. Itu yang dialami oleh penduduk yang tinggal di sekitar Danau Matano, Sulawesi Selatan, setelah PT. Inco, anak perusahaan Inco

Ltd., Kanada (saat ini Vale Inco, Brazil), memperoleh KK untuk mengeksploitasi biji Nikel di wilayah itu. Seperti Denise Leith yang menulis disertasi doktor tentang Freeport, disertasi doktor Katrin M. Robinson<sup>44</sup> tentang PT Inco juga menggambarkan bagaimana industri pertambangan yang memperoleh perlakuan istimewa pemerintah, menimbulkan sengketa tanah, pencemaran lingkungan, dan beragam pelanggaran hak asasi manusia. Tidak berlebihan, Robinson (1986) menulis bukunya tentang pertambangan PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, di bawah judul ‘Stepchildren of Progress.’

Sengketa sejenis terjadi meluas di berbagai industri berbasis sumber daya alam lainnya, seperti kehutanan, perkebunan dan sebagainya. Akar dari sengketa, karena semakin kuatnya negara melindungi hak-hak milik pribadi (*private*

---

<sup>44</sup> K. M. Robinson, *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesia Mining Town*, (Albany: State University of New York, 1986).



*property ownership*), dengan memberi jaminan kepada korporasi-korporasi swasta, dan dalam waktu yang sama tidak mengakui berbagai model kepemilikan para petani. Itu juga yang terjadi dengan berbagai proyek infrastruktur, terutama bendungan, yang didanai oleh lembaga-lembaga keuangan multilateral, atau badan-badan keuangan luar negeri lainnya. Kasus pembangunan waduk Kedungombo di Jawa Tengah adalah salah satu contohnya.

### **Pendalaman Neoliberalisasi**

Krisis ekonomi dan politik 1997-8, menjadi pintu masuk IMF untuk secara sistematis mendiktekan agenda neoliberal dengan cakupan yang sangat luas. Agenda-agenda itu dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya dapat dengan mudah kita lihat dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan untuk melayani pasar agar bekerja sebebas-bebasnya terungkap

dari berbagai UU, seperti UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang perubahan UU Kehutanan, dan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal Asing. Semua UU ini memiliki semangat yang sama: memberikan kemudahan akses perusahaan-perusahaan swasta untuk mengeruk sumber daya alam dengan jaminan hak milik yang lebih kuat.

Ekspansi besar-besaran dalam industri perkebunan sawit di luar Jawa, yang mengantar Indonesia menjadi produsen utama *crude palm oil* (CPO) di dunia, menjadi contoh paling baik. Dengan luas kebun sawit di tahun 1985 sekitar 600.000 hektare dan berkembang menjadi 4,1 juta hektare di tahun 2003, membuat Indonesia menjadi pemain penting dalam industri perkebunan sawit dunia, di belakang Malaysia. Pada tahun 2002, nilai ekspor produk-produk minyak

sawit Indonesia mencapai USD 2,1 miliar. Sektor ini juga mempekerjakan tenaga kerja secara langsung mencapai 800.000 orang dan 2 juta orang secara tidak langsung<sup>45</sup>. Tidak pelak lagi, ini merupakan buah dari kebijakan-kebijakan neoliberal di sektor ini: Bank Dunia memperkenalkan skema 'Kebun Inti dan Plasma' sejak 1990-an; Sejak 1996, untuk mendorong sektor swasta, pemerintah memberikan subsidi melalui pinjaman bank dengan tingkat suku bunga yang rendah; pengurangan pajak ekspor secara progresif untuk produk-produk minyak sawit seperti *crude palm oil* (CPO); *refined, bleached, deodorised* (RBD) *palm oil*; *crude olein*; dan RBD *olein*; pemberian izin untuk lahan perkebunan yang luas, termasuk konversi hutan-hutan alam sekitar 6 juta hektare<sup>46</sup>. Sejak krisis 1997/8,

---

<sup>45</sup> J.W.V. Gelder, *Greasy Palms: European Buyers of Indonesian Palm Oil*, (London: Friends of the Earth, Ltd, 2004).

<sup>46</sup> Lihat A. Casson, "the Political Economy of Indonesia's Oil Palm Subsector. In C.J. Cofler & I.A.P. Resosudarmo,

IMF mendorong liberalisasi investasi perkebunan sawit, seperti tertuang dalam poin 39 Letter of Intent (LoI, 15 Januari 1998), yakni dengan menghapus hambatan investasi asing di dalam industri ini.

Hal lain adalah peranan Internasional Finance Corporation (IFC), lembaga di bawah Bank Dunia, yang aktif mempromosikan ekspor hasil-hasil agrobisnis di Indonesia dengan menciptakan iklim investasi yang pro pasar. Tahun 2002, IFC menyediakan *stand-by equity* senilai USD 16.5 juta untuk PT Astra International dalam rangka restrukturisasi utang perusahaan itu<sup>47</sup>. Seperti kita ketahui, Astra adalah salah satu perusahaan raksasa yang juga memiliki perkebunan sawit yang menyebar di Sumatra,

---

(eds.), *Which Way Forward?: People, Forests, and Policymaking in Indonesia*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002); D. F. Larson, "Indonesia's Palm Oil Subsector", *Policy Research Working Paper*, (The World Bank, 1996).

<sup>47</sup> R. Carrere, *Oil Palm: From Cosmetics to Biodiesel, Colonization Lives On*, (Montevideo: WRI, 2006).

Kalimantan, dan Sulawesi, yang pada tahun 2004 memiliki areal perkebunan sawit yang telah ditanami seluas 189.970 hektare dengan kapasitas produksi CPO mencapai 543.635 ton per tahun<sup>48</sup>.

Tetapi peranan IFC yang penting adalah mendukung Wilmar Trading. Perusahaan Singapura yang memiliki empat pabrik penyu-lingan CPO di Indonesia dan sebuah pabrik di Malaysia dengan total produksi mencapai 3,3 juta ton per tahun, dan juga memiliki beberapa anak perusahaan perkebunan sawit di Sumatra. IFC memberi jaminan USD 3,3 juta untuk Wilmar, yang diperbaharui setiap tahun selama tiga tahun, sehingga memudahkan perusahaan itu untuk memperoleh pinjaman dari bank-bank komersial. Ini merupakan bagian dari usaha IFC agar Wilmar memiliki modal yang terjaga untuk membeli CPO dari perkebunan sawit di

---

<sup>48</sup> Gelder, *Greasy Palms*

Indonesia untuk kemudian disuling lagi sebelum diekspor. Ringkas cerita, demikian Carrere, dengan jaminan kredit dari IFC, Wilmar dan anak-anak perusahaannya di Indonesia dapat mempertahankan ekspor hasil perkebunan sawit dan meraup profit dari sana<sup>49</sup>.

Pertumbuhan fantastis industri kapitalis perkebunan sawit dalam masa belasan tahun terakhir, berlangsung melalui praktik-praktik akumulasi primitif dengan pola-pola sebagai berikut. Pertama, konflik tanah menjadi hal paling menonjol karena klaim kepemilikan yang berbeda. Sebuah studi yang dilakukan Amzulian Rifai tentang 78 konflik antara petani dengan perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatra Utara menunjukkan konflik itu terjadi karena: lahan petani diambil secara ilegal dan paksa; tidak ada kompensasi yang dibayarkan untuk tanaman-tanaman di atas lahan yang

---

<sup>49</sup> Op.Cit

masuk dalam areal konsesi; pohon-pohon karet yang dimiliki petani dirusak oleh perusahaan dengan cara membakar ketika melakukan pembersihan lahan dan meski tanah-tanah petani terdapat dalam areal konsesi, tetapi mereka tidak memperoleh bagian keuntungan<sup>50</sup>.

Kedua, mempekerjakan buruh-buruh murah (termasuk anak-anak dan perempuan) dengan kesehatan kerja yang buruk. Ini dimungkinkan karena sumber utama para pekerja adalah warga-warga miskin dari wilayah-wilayah padat penduduk di Jawa, Bali, NTT direkrut di bawah program perkebunan inti rakyat-transmigrasi (PIR-trans) dan (eks) petani setempat yang telah kehilangan tanah.

Ketiga, di balik proses itu, seperti biasa, kekerasan menjadi bagian penting ketika konflik antara perusahaan dan petani meningkat. Di

Desa Salulebo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, propinsi yang baru dimekarkan dari Sulawesi Selatan, (14/2/2007), PT Astra Agro Lestari membayar milisi dan Brimob untuk menyerang Forum Aliansi Masyarakat Tani Mamuju, ketika sedang berada di lahan garapan mereka. Akibat serangan ini, seorang anggota milisi tewas, karena para petani memberikan perlawanan. Beberapa petani kemudian ditangkap polisi dan memperoleh penyiksaan selama dalam tahanan<sup>51</sup>. Di Kampung Banjaran Kecamatan Secanggang, Kab. Langkat, Sumatera Utara (25/8/2008), aparat Polres Langkat melakukan penangkapan disertai tindak kekerasan terhadap 100 petani di area perkebunan sawit milik PT. Buana Estate, karena para petani berusaha mempertahankan tanah mereka yang telah diserahkan oleh pemerintah kepada

---

<sup>51</sup> Anonymous (N.D.a) Laporan Perkembangan Konflik Agraria Periode Januari-April 2007. [online]. Dapat diakses melalui: [http://www.kpa.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=124&Itemid=99](http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=99). [Akses: 5-6-2009].

---

<sup>50</sup> E.F. Collins, *Indonesia Betrayed How Development Fail*, (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2007).

perusahaan<sup>52</sup>. Di Sumatra Barat, pertumbuhan perkebunan Sawit di daerah itu juga ditandai dengan kekerasan, ketika aparat polisi bersenjata mengintimidasi penduduk setempat untuk menyerahkan lahan mereka kepada PT Permata Hijau Pasaman, anak perusahaan dari Wilmar sejak April 2000. Sebuah NGO di sana melaporkan itu dilakukan melalui intimidasi, penembakan, penculikan, penangkapan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan<sup>53</sup>.

Tampaknya, kekerasan bukan hanya monopoli industri perkebunan sawit. Seperti terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan (21/3/2003), konflik tanah antara PT London Sumatra (LonSum) dengan petani setempat, karena ekspansi kebun karet berlangsung

---

<sup>52</sup> Anonymous (N.D.b) Ratusan Petani Langkat Ditangkap Polisi atas 'Sponsor' Buana Estate, [online]. Dapat diperoleh melalui: <http://api-indonesia.blog.friendster.com/> [akses: 5-6-2009].

<sup>53</sup> Carrere, *Oil Palm*:

berdarah-darah. Pasukan Brimob secara sewenang-wenang memukuli dan menembaki petani yang berusaha merebut tanah mereka kembali. Akibat tindakan kekerasan ini empat orang meninggal dunia, banyak orang menderita luka-luka, 14 orang dimasukkan ke penjara, dan sejumlah aktivis pro-demokrasi yang mendampingi perjuangan rakyat Bulukumba, terpaksa 'tiarap' karena dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang<sup>54</sup>.

Bagaimana kekerasan seperti ini harus dijelaskan? Pandangan umum melihatnya sebagai problem aparat keamanan, yang selain dianggap 'haus darah,' juga 'haus uang.' Para komandan pasukan mengerahkan anak buah melindungi perusahaan, karena memperoleh pelayanan dari perusahaan. Setelah reformasi, cerita-cerita

---

<sup>54</sup> G. J. Aditjondro, "Dinamika Politik Dan Modal Di Sulawesi: Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor prodemokrasi?", (Makalah disampaikan dalam pertemuan aktivis di Palu, 2006).

semacam ini terjadi di mana-mana, terutama dalam industri perkebunan dan pertambangan. Misalnya, harian *the New York Times*, dalam sebuah laporan menyebutkan, antara 1998-2004, Freeport menyatakan telah menyerahkan uang sekitar USD 20 juta kepada para jenderal, kolonel, mayor, dan kapten baik TNI maupun polisi. Para komandan menerima puluhan ribu dolar, dan dalam sebuah kasus memperoleh sekitar USD 150,000<sup>55</sup>. Pembayaran seperti itu terus saja berlangsung, dan di tahun 2008, perusahaan membayar sekitar USD 1,6 juta kepada aparat keamanan<sup>56</sup>. Kepada

---

<sup>55</sup> Perlez & R. Bonner (2005), "the Cost of Gold, The Hidden Payroll: Below a Mountain of Wealth, a River of Waste, *New York Times*, December 27. [Online]. dapat diakses melalui: [http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html?pagewanted=1&\\_r=1&ei=5070&en=0ee1bc8941899f9f&ex=1138078800](http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html?pagewanted=1&_r=1&ei=5070&en=0ee1bc8941899f9f&ex=1138078800) [akses 1-6-2009].

<sup>56</sup> Anonymous (N.D.c) US mining giant still paying Indonesia military. [Online]. diakses melalui: <http://www.google.com/hostednews/afp/article/>

*New York Times*, perusahaan menyatakan:

"There is no alternative to our reliance on the Indonesian military and police in this regard.... The need for this security, the support provided for such security, and the procedures governing such support, as well as decisions regarding our relationships with the Indonesian government and its security institutions, are ordinary business activities".<sup>57</sup>.

Relasi seperti ini selalu dipandang sebagai masalah 'governance,' baik di tingkat perusahaan maupun di jajaran pemerintah. Tentu saja, pandangan begini bersifat reduksionis, karena hanya melihatnya sebagai bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan korupsi oleh aparat kekuasaan negara, apalagi biasanya berakhir dengan

---

ALeqM5jJMKtoD9LnT34URkkkjmTjaSf8EA". [Akses: 5-6-2009].

<sup>57</sup> Perlez & Bonner, Op.cit

menjadikan serdadu-serdadu berpangkat rendah sebagai kambing hitam. Lebih dari itu, masalah ini harus dilihat sebagai sesuatu yang tertanam di dalam jantung sistem kapitalis, yakni keharusan untuk melindungi proses-proses penumpukan kekayaan swasta. Dengan kata lain, di sinilah letak relevansi kritik terhadap neoliberalisme, di mana pengerahan pasukan secara resmi sejatinya bertujuan melindungi super profit yang diperoleh perusahaan-perusahaan swasta.

### Catatan Penutup

Pertama, neoliberalisme dapat disimpulkan sebagai paham dalam sistem kapitalis yang paling ekstrem, berintikan minimalisasi peranan pemerintah dalam urusan ekonomi dan menyerahkannya kepada pasar. Ini didasarkan pada anggapan bahwa pasar dapat mengurus dirinya sendiri. Bentuk-bentuk intervensi pemerintah tentu saja dianggap sebagai ancaman terhadap

kebebasan, dalam pengertian merusak kebebasan pasar.

Kedua, secara praktis, pelaksanaan doktrin paham ini dapat dilihat dari liberalisasi perdagangan, keuangan, dan investasi swasta, termasuk privatisasi tanggung jawab sosial pemerintah. Intinya adalah agar perdagangan barang dan jasa bisa berlangsung secara bebas, begitu juga pergerakan modal, dan kebebasan berinvestasi dalam konteks global.

Ketiga, neoliberalisme merupakan paham yang utopis, karena tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan pasar dapat bergerak tanpa campur tangan pemerintah. Hanya dari tangan pemerintah yang konkret pasar dapat bergerak melalui berbagai peraturan. Dengan kata lain, apa yang disebut dengan 'pasar bebas,' dan 'perdagangan bebas,' bukan sesuatu yang 'terjun bebas' dari langit, tetapi dibikin oleh pemerintah, melalui rapat-rapat di parlemen, di kantor-kantor kementerian, atau di hotel-hotel berbintang.

Tidak peduli seperti apa pemerintah itu, baik yang terpilih melalui demokrasi borjuis maupun yang memperolehnya melalui kudeta berdarah. Bahkan, demi pasar, semua bentuk pemerintah dapat menyebar teror dengan aneka cara.

Keempat, di Indonesia, ide-ide neoliberalisme secara evolusioner telah berkembang, sekurang-kurangnya sejak awal Orde Baru, dan berlangsung lebih cepat setelah keruntuhannya. Ini bisa dilihat pada mata rantai kebijakan pro-pasar yang tidak putus sejak kejatuhan rezim Soekarno hingga pasca-kejatuhan rezim Soeharto. Salah satu aspek paling mencolok dari mata rantai itu adalah perkembangan industri-industri berbasis sumber daya alam, seperti yang sudah ditunjukkan dalam pertambangan dan perkebunan. Ekstraksi surplus dalam kedua industri ini berlangsung masif setelah liberalisasi investasi dan perdagangan, perlindungan terhadap hak-hak milik individu, dan termasuk penggunaan aparat bersenjata.

Perpindahan rezim dari Orde Baru yang berwa-tak diktator ke rezim-rezim reformasi tidak punya arti apa-apa dilihat dari sisi hubungan antara negara dan modal. Fungsi kedua rezim untuk mengurus kepentingan kaum borjuis tetap saja berlangsung, dengan melakukan apa pun agar pengerukan kekayaan dapat terus bekerja.

Kelima, fakta-fakta tersebut mengantarkan kita untuk mempertanyakan pengertian *freedom*, yang dirayakan selama masa-masa reformasi ini. Untuk siapa sebenarnya *freedom* itu? Tampaknya, sangat paradoks, ketika mahasiswa dan LSM bebas berunjuk rasa, wartawan menikmati kebebasan pers, dan *political entrepreneurs* bebas melakukan manuver untuk mengeruk keuntungan materiil dan popularitas di tengah sistem politik yang terbuka, tetapi dalam waktu yang sama praktik-praktik pengusiran (*dispossession*) terhadap kaum pekerja, petani, dan kelompok-kelompok rentan lain bebas berlangsung di depan mata.\*\*\*



\*Bab ini sebelumnya telah terbit sebagai artikel di Harian IndoPROGRESS, 17 Agustus 2009. <http://indoprogress.com/2009/08/neoliberalisme-1/>

### Daftar Pustaka

- A. Casson (2002), "the political economy of Indonesia's oil palm subsektor". In C.J. Cofler & I.A.P. Resosudarmo, (eds.) *Which Way Forward?: People, Forests, and Policymaking in Indonesia*. Singapore: Institut of Southeast Asian Studies.
- A. Flew (1996), "the Influence of the Discipline of Philosophy in Post-War Britain" (in an interview with A. Seldon). *Contemporary British History*, 10 (2):117 — 125.
- Anonymous (N.D.a), "Laporan Perkembangan Konflik Agraria Periode Januari-April 2007",

[online]. Dapat diakses melalui: [http://www.kpa.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=124&Itemid=99](http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=99). [Akses: 5-6-2009].

Anonymous (N.D.b), "Ratusan Petani Langkat Ditangkap Polisi atas 'Sponsor' Buana Estate", [online]. Dapat diperoleh melalui: <http://api-indonesia.blog.friendster.com/> [akses: 5-6-2009].

Anonymous (N.D.c). "US mining giant still paying Indonesia military", [online]. Diakses melalui: <http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jJMKtoD9LnT34URkkkJmTjaSf8EA> [Akses: 5-6-2009].

A. Rosser (2002), *the Politics of Economic Liberalisation in Indonesia: State, market, and power*. Richmond: Curzon Press.

- B. May (1978), *the Indonesian Tragedy*, London: R. & K. Paul, 1978.
- D. F. Larson (1996), "Indonesia's Palm Oil Subsector", *Policy Research Working Paper*, The World Bank.
- D. Harvey (2007), "Neoliberalism and Creative Destruction". *ANNALS, AAPS*, 610, March, p.34-5.
- D. Harvey (2005), *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- D. Harvey (2003), *the New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- D. Leith, (2002), *the Politic of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. Honolulu: University of Hawai.
- D. Ransom (1970), "Berkeley Mafia and the

- Indonesian Massacre". *Ramparts*, October. pp. 27-29.
- D. Whyte (2007), "the Crimes of Neo-liberal Rule in Occupied Iraq". *BRIT. J. CRIMINOL*. 47 (2): 177–195.
- D. Yergin & J. Stanislaw (1998), *the Commanding Heights: the Battle Between Government and the Marketplace that is Remaking the Modern World*. New York: Simon & Schuster.
- E.F. Collins (2007), *Indonesia Betrayed How Development Fail*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- F.A. Hayek (1960), *the Constitution of Liberty*. London: Routledge & Kegan Paul.
- F.A. Hayek (1944), *the Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press.

- F. Block (2001), "Introduction". In K. Polanyi, *Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press. p.xxiv.
- G. J. Aditjondro (2006), "Dinamika Politik Dan Modal Di Sulawesi: Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor prodemokrasi?". *Makalah disampaikan dalam pertemuan aktivis di Palu*.
- H. Farid (2005), "Indonesia's Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965-66". *Inter-Asia Cultural Studies*, Volume 6, Number 1, p.3-16.
- J. Emel & M.T. Huber (2008), "a Risky Business: Mining, Rent and the Neoliberalization of "Risk". *Geoforum* (39): 1394.
- J. E. Stiglitz (2006), "Globalism's discontents".

- In D.B. Grusky & S. Szelenyi (eds.) *The Inequality Reader: Contemporary and Foundational Readings in Race, Class, and Gender*. Boulder, Colorado : Westview Press.
- J. E. Stiglitz & L. Bilmes (2008), *the Three Trillion Dollar War: the True Cost of the Iraq*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- J. Ikenberry (2001-2002), "American Grand Strategy in the Age of Terror". *Survival*, 43(4):19-34.
- J. Gray (1998), *Hayek on Liberty*. London: Routledge.
- J. M. Cypher (2007), "From Military Keynesianism to Global-Neoliberal Militarism". *Monthly Review*, 59 (2): 37-55.
- J. Perlez & R. Bonner (2005), "the Cost of Gold, The Hidden Payroll: Below a

Mountain of WEalth, a River of Waste, *New York Times*, December 27. [Online]. dapat diakses melalui: [http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html?pagewanted=1&\\_r=1&ei=5070&en=0ee1bc8941899f9f&ex=1138078800](http://www.nytimes.com/2005/12/27/international/asia/27gold.html?pagewanted=1&_r=1&ei=5070&en=0ee1bc8941899f9f&ex=1138078800) [akses 1-6-2009]. Petras & F.I. Leiva (1994), *Democracy and Poverty in Chile: The Limits to Electoral Politics*. Oxford: Westview Press.

- J. Roosa, (2006), *Pretext for Mass Murder: The September 30th movement & Suharto's coup d'tat in Indonesia*. Wisconsin: University of Wisconsin.
- J. Williamson (2004), "the Washington Consensus as Policy Prescription for Development". A lecture in the series "Practitioners of Development" delivered at the World Bank on January 13.

- J. Williamson (2000), "What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?", *The World Bank Research Observer*, 15 (2): 251-64.
- J.W.V. Gelder (2004), *Greasy Palms: European Buyers of Indonesian Palm Oil*. London: Friends of the Earth, Ltd.
- K. Marx (1990[1867]), *Capital: A Critique of Political Economy*, Volume I. London: Pelican Books (reprinted in Penguin Classic).
- K. M. Robinson (1986), *Stepchildren of Progress: The Political Economy of Development in an Indonesia Mining Town*. Albany: State University of New York.
- K. Polanyi (2001[1944]), *the Great Transformation: The Political and Economic*

- Origins of Our Time*. Boston: Beacon Press.
- M. Beeson & I. Islam (2006), "Neoliberalism and East Asia: Resisting the Washington Consensus". In K. Hewison & R. Robison (eds.), *East Asia and the Trials of Neo-Liberalism*. London: Routledge.
- M. Friedman (1962), *Capitalism and Freedom*. Chicago: The University of Chicago Press.
- M. Mann (1984), "Capitalism and Militarism". In M. Shaw (ed.), *War, State, and Society*. London: McMillan Press, p.25-46.
- M. Naim (2000), "Washington Consensus or Washington Confusion?". *Foreign Policy*, SPRING.
- O. Letelier (1976), "Economic Freedom's' Awful Toll: The 'Chicago Boys' in Chile". *Review of Radical Political Economics*, 8(3):44-52.

- R. Carrere (2006), *Oil Palm: From Cosmetics to Biodiesel, Colonization Lives On*. Montevideo: WRI
- R. Cribb (2002), "Unresolved Problems of Indonesian Killings in 1965-1966". *Asian Survey*, 42 (4): 550-563.
- R. J. Alexander (1978), *the Tragedy of Chile*. London: Greenwood Press.
- P. W. Singer (2003), *Corporate Warrior: the Rise of the Privatized Military Industry*. Ithaca: Cornell University Press.
- S. Arismunandar (2008), "Memilih Bunuh Diri Karena Kenaikan Harga BBM", [online]. Dapat diakses melalui: <http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=8238>. [akses pada 5-6-2009].
- VHR Media.com (2007), Penyebab Utama Kemiskinan: 50.000 Orang Indonesia

Bunuh Diri Selama 3 Tahun Terakhir, 16 November.

V.R. Hadiz & R. Robison (2006), "Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidation: the Indonesia Paradox. In K. Hewison & R. Robison (eds.) *East-Asia and the Trials of Neoliberalism*. London: Routledge

## Biodata Penulis

Coen Husain Pontoh adalah Editor IndoPROGRESS. Ia memperoleh gelar M.A dalam ilmu politik dari Graduate Center for Workers Education (GCWE), Brooklyn College, City University of New York (CUNY). Buku terbarunya sebagai editor dan kontributor adalah Oligarki: Teori dan Kritik, yang diterbitkan oleh Marjin Kiri, 2019.

\*\*\*

Arianto Sangadji adalah Direktur IndoPROGRESS Institute for Social Research and Education (IISRE). Ia memperoleh gelar PhD di bidang geografi dari York University, Canada, dan salah satu kontributor untuk buku Oligarki: Teori dan Kritik.

